

**PELAKSANAAN PENGANGKONAN (PENGANGKATAN ANAK)
DALAM PERKAWINAN BEDA SUKU PADA MASYARAKAT
LAMPUNG PEPADUN DI DESA NEGERI SAKTI
KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Wisuda Strata S-2 Program Studi

Magistert Kenotariatan

Universitas Diponegoro



Oleh :

INDAH PUTRIANA, S.H.

B4B006143

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2008

TESIS

**PELAKSANAAN PENGANGKONAN (PENGANGKATAN ANAK)
DALAM PERKAWINAN BEDA SUKU PADA MASYARAKAT
LAMPUNG PEPADUN DI DESA NEGERI SAKTI
KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

Oleh :

Indah Putriana, S.H.
B4B006143

Telah disetujui oleh :

Mengetahui :

Pembimbing Utama

Ketua Program

Sukirno, S.H.M.Si.
NIP.131 875 449

H. Mulyadi, S.H., M.S.
NIP.130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu Perguruan tinggi atau Lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumber nya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, April 2008

Yang Menyatakan

(Indah Putriana, SH)

B4B006143

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan Tesis dengan judul “ **Pelaksanaan Pengangkatan (Pengangkatan Anak) Dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun Di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung**”.

Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata 2 (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu akan penulis akan menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan petunjuk dan bantuan yang tidak ternilai harganya, dengan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang, beserta stafnya.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
3. Bapak Mulyadi, S.H.,M.S, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Yunanto, S.H.,M.Hum, Selaku Sekertaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

5. Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum selaku Sekertaris II Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Sukirno, S.H., M.Si, selaku pembimbing, atas bantuan dan bimbingan serta pengarahan kepada penulis.
7. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi, S.H., M.Hum, selaku tim penguji.
8. Bapak A. Kusbiyandono, S.H., M. Hum, selaku tim penguji.
9. Para dosen pengajar di lingkungan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
10. Bapak Usman Yusuf, Ismail, Drs Nawawi,SP, Drs. Yudha Rozali yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan keterangan dan informasinya..
11. Keluarga Tercinta; Papi, Mamiku “ tiada jasa yang dapat ananda balas, terima kasih telah membesarkan ananda dengan sangat sempurna, takkan pernah terbalas” serta kakak-kakakku tersayang, Oktonoventa, Rio Kelana dan Melanda Sukma. Terima kasih atas dukungannya.
12. Budhi Junaidi, S.i.p, untuk perhatian, pengertian, kesabaran dan dukungan semangatnya kepada penulis.
13. Kepada seluruh teman dan sahabat penulis, ‘Aditya’ “trima kasih atas perhatian, persahabatan, dukungan serta semangatnya ya...”,Surya, Ome, Mia, Septi, Widya, Ratih, Anak-anak kos peleburan raya 34 dan seluruh teman-teman yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

14. Kepada segenap staf Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang atas bantuannya dalam memberikan dukungan fasilitas kepada penulis.

15. Serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.

Atas semua jasa baik tersebut penulis berdoa kepada Allah SWT, agar ilmu dan amal yang telah diberikan kepada penulis, mendapat imbalan dan balasan yang setimpal dan berlipat ganda di sisi Allah SWT. Amin ya Rabbal' alamin.

Akhir kata penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. penulis juga mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang penulis lakukan saat ini mendapat ridha Allah SWT.

Wassalam Mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, April 2008

Penulis

Indah Putriana, S.H

B4B006143

ABSTRACT

Lampung Pepadun society recognize the existence of Endogamy marriage previously, where a Lampung citizen acquired to look for husband candidate or wife in his own family area and prohibited to look for outside family area . With growth of era hence Lampung Pepadun societies allow get married from different ethnic by previously confession. Confession must be done if people Lampung Pepadun wish to married with other tribe or different buay (descent), but Lampung Pepadun society Negeri Sakti village has own definition that is, anyone should be done *Pengangknan* (confession) for different tribe people only.

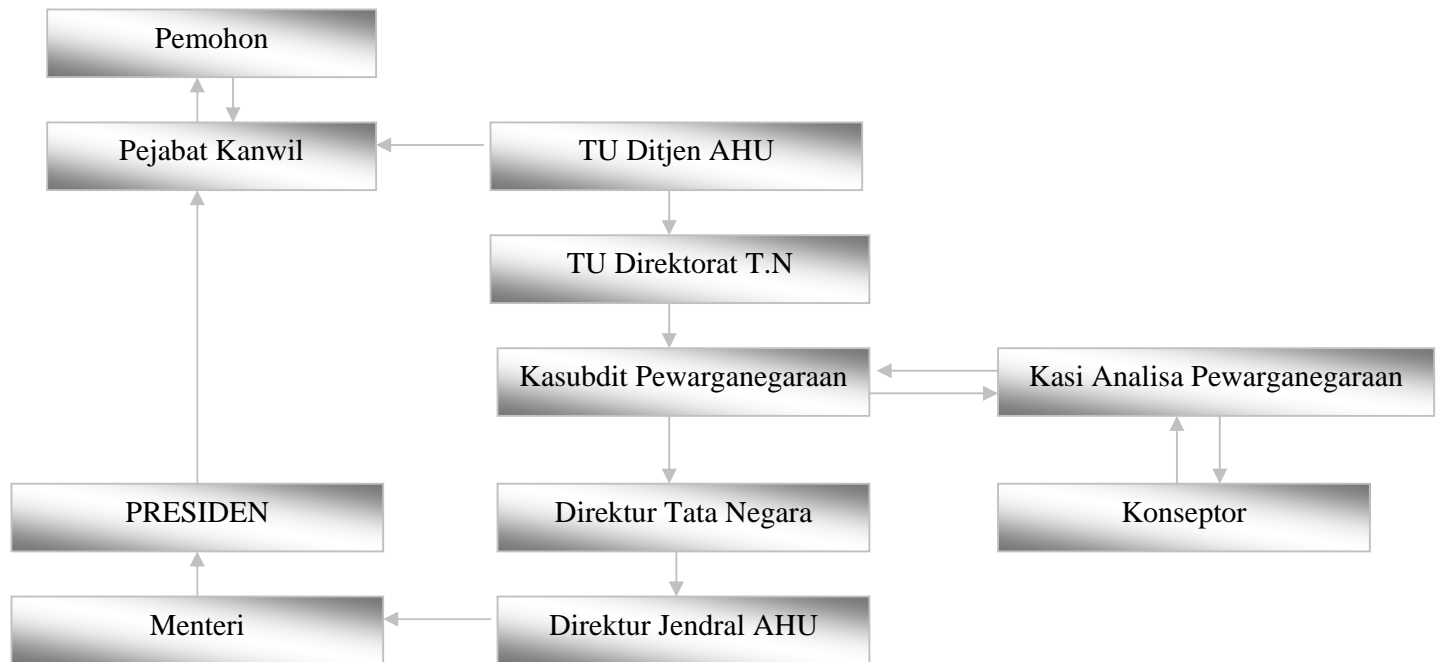
Aim of this research is to find out Confession Implementation of Lampung Pepadun society and to know the people position that's occupied in Lampung Pepadun tradition.

In this thesis writing, writer using descriptive-analysis research by judicial empirical approach, whereas data get from literature and field, then data analyzed qualitatively.

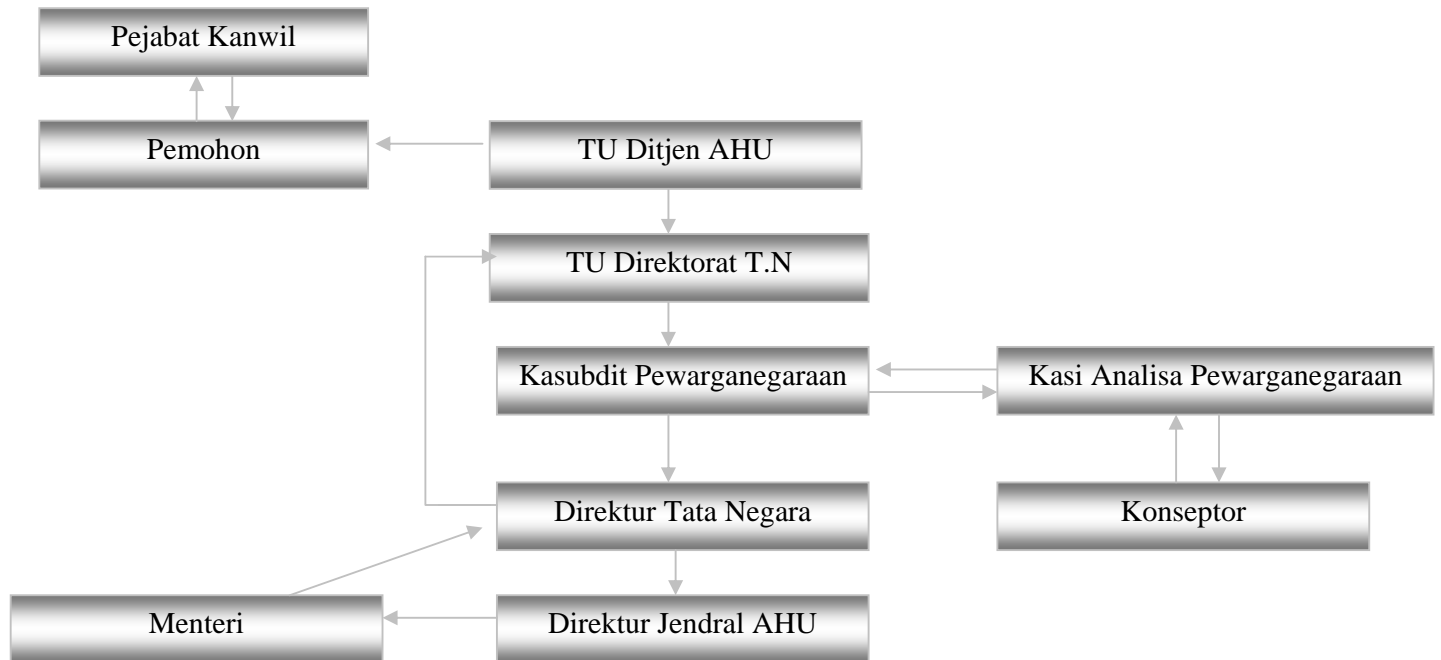
Result of that research conclude that confession implementation in Lampung Pepadun society wedding of Negeri Sakti Village runs deal with custom certainly, that is began from appointment of step father until *uno* payment (custom money) as implementation definition of *ngangknan* (confession). Wedding implementation of Lampung Pepadun society carry out by several steps are: first, propose marriage ceremony (pineng) marked by giving a number of money to woman party, second, ceremony of woman brigeroom pick up who will bring to man's place to carry out the wedding, third, cuak mengan ceremony that is notice activities to all family and public related party whose carry out that activity already der wife candidate, fourth, wedding execution ceremony and manjau pendem ceremony as the final of wedding activity which already done. Son-or daughter-in-law position can be custom occupied and legal being Lampung custom society. *Ngangknan* ceremony done before wedding ceremony be done traditionally, because this activity is combination should be done when married different tribe people, in order to get legally confession from perwatin committee and custom society.

Keyword: Child adoption, different tribe wedding.

**ALUR PROSES PERMOHONAN PERNYATAAN PEWARGANEGARAAN
PASAL 8 UU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN R.I
DIREKTORAT JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**ALUR PROSES PERMOHONAN PERNYATAAN PEWARGANEGARAAN
PASAL 8 UU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN R.I
DIREKTORAT JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



ABSTRAK

Masyarakat Lampung Pepadun dahulu mengenal dengan adanya perkawinan Endogami, dimana seseorang warga adat Lampung diharuskan mencari calon suami atau istri dalam lingkungan kerabatnya sendiri dan dilarang mencari ke luar dari lingkungan kerabat. Dengan perkembangan zaman maka masyarakat adat Lampung Pepadun diperbolehkan menikah dengan luar sukunya dengan syarat diadakan pengangkatan terlebih dahulu. Pengangkatan harus dilakukan apabila orang Lampung Pepadun ingin menikah dengan orang yang berlainan suku atau berbeda buay (keturunan), namun masyarakat adat Lampung Pepadun Desa Negeri Sakti memiliki ketentuan tersendiri yaitu, seseorang harus melakukan pengangkatan diperuntukkan hanya pada orang yang berlainan suku saja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pengangkatan pada masyarakat Lampung Pepadun dan untuk mengetahui kedudukan seseorang yang telah diangkat dalam masyarakat adat Lampung Pepadun.

Dalam penulisan Tesis ini penulis menggunakan Penelitian yang bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh melalui kepustakaan dan lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkatan dalam perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Negeri Sakti berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat, yaitu mulai dari pengangkatan bapak angkat sampai dengan pembayaran uno (uang adat) sebagai penentu terlaksananya angkat. Pelaksanaan perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu : *Pertama*, upacara lamaran (pineng) yang ditandai dengan pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan, *Kedua*, upacara penjemputan mempelai yakni pengantin wanita akan dibawa kediaman calon pengantin pria untuk melangsungkan pernikahan kediaman pengantin pria, *Ketiga*, upacara cuak mengang yakni merupakan tindakan pemberitahuan kepada seluruh kerabat dan masyarakat umum bahwa pihak yang melaksanakan acara tersebut telah mengambil seorang calon pengantin, *Keempat*, pelaksanaan upacara perkawinan dan upacara manjau pedem yaitu sebagai akhir dari acara perkawinan yang telah dilakukan. Kedudukan menantu dapat diakui dalam adat dan sah menjadi warga adat Lampung. Upacara angkat dilakukan sebelum upacara perkawinan dilangsungkan secara adat, karena kegiatan ini merupakan suatu rangkaian yang harus dilakukan apabila menikah dengan orang yang berlainan suku, guna mendapatkan pengakuan secara sah dari majelis perwatin dan masyarakat adat.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Perkawinan Beda Suku

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| ABSTRACT..... | vii |
| ABSTRAK..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-------------------------------------|---|
| A. Latar Belakang masalah..... | 1 |
| B. Permasalahan..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Sistematika Penulisan Tesis..... | 9 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Hukum Adat..... | 11 |
| 1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat..... | 11 |
| 2. Macam-macam Masyarakat Adat..... | 12 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan..... | 14 |

| | |
|--|----|
| 1. Perkawinan menurut Hukum Adat..... | 14 |
| 2. Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat..... | 15 |
| 3. Bentuk Perkawainan Pada Masyarakat Adat..... | 16 |
| C. Pengangkatan Anak..... | 20 |
| 1. Pengertian Pengangkatan Anak/Adopsi..... | 20 |
| 2. Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Adat.. | 23 |
| 3. Pengangkatan Anak Menurut PP RI Nomor 54 Tahun 2007..... | 25 |
| 4. Tujuan Pengangkatan Anak..... | 26 |
| 5. Syarat Pengangkatan Anak..... | 28 |
| 6. Tata Cara Pengangkatan Anak..... | 30 |
| D. Hubungan Anak Dan Kerabatnya..... | 37 |
| 1. Pertalian Darah..... | 37 |
| 2. Pertalian Perkawinan..... | 38 |
| 3. Pertalian Adat..... | 39 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Metode Pendekatan..... | 42 |
| B. Spesifikasi Penelitian..... | 43 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 43 |
| D. Populasi dan Sampel..... | 44 |
| E. Jenis dan Sumber Data..... | 44 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 46 |

| | | |
|---------------|---|----|
| | G. Analisis Data..... | 46 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| | A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kecamatan Gedong | |
| | Tataan Kabupaten pasawaran..... | 47 |
| | 1. Letak Geografis..... | 47 |
| | 2. Struktur Masyarakat Lampung..... | 48 |
| | 3. Struktur Masyarakat Lampung Papadun..... | 49 |
| | 4. Tata cara Upacara Perkawinan pada Masyarakat | |
| | Adat Lampung Papadun..... | 52 |
| | B. Pelaksanaan Pengangkongan (Pengangkatan Anak dalam | |
| | Perkawinan Beda Suku pada Masyarakat Adat | |
| | Lampung Pepadun..... | 62 |
| | 1. Pelaksanaan Ngangkong..... | 65 |
| | 2. Tata Cara Pelaksanaan Upacara Ngangkong..... | 66 |
| | 3. Pengaruh Ngangkong dalam Perwakilan..... | 70 |
| | 4. Makna Ngangkong..... | 77 |
| | C. Kedudukan Anak yang telah Diangkong dalam Masyarakat | |
| | Adat Lampung Papadun..... | 78 |
| BAB V | SIMPULAN DAN SARAN | |
| | A. Kesimpulan..... | 82 |
| | B. Saran..... | 83 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami tiga peristiwa penting, yaitu waktu dilahirkan, waktu menikah atau berkeluarga dan ketika meninggal dunia. Meskipun semuanya tidak mengalami tiga masa tersebut, ada yang mengalami masa kelahiran kemudian meninggal dunia, namun ada juga yang dapat mengalami masa kelahiran, pernikahan dan meninggal dunia. Dan sudah menjadi kodratnya pula bahwa antara seseorang perempuan dan seseorang laki-laki mempunyai keinginan untuk hidup bersama dan membina rumah tangga yaitu dengan melangsungkan pernikahan atau perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang berbahagia dan kekal, selain itu perkawinan akan mempersatukan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain.

Menurut hukum adat perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, bisa juga merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok warga yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum, perkawinan para warga adatnya adalah sarana untuk melangsungkan hidup

kelompoknya secara tertib dan teratur, dan sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang bisa melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun didalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu perkawinan juga merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut.

Di Indonesia diantara orang-orang Indonesia asli yang tersebar di berbagai daerah ada beberapa sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan ke dalam tiga golongan, yaitu; Pertama, sifat kebapakan (Patrilineal); Kedua, sifat keibuan (Matrilineal); Ketiga, sifat kebapak ibuan (Parental)¹. Dalam kekeluargaan yang bersifat patrilineal seorang istri karena perkawinannya adalah dilepaskan dari hubungan kekeluargaan dengan orangtuanya dan seluruh keluarga suaminya. Sistem kekeluargaan yang bersifat patrilineal seperti ini disebut dengan perkawinan jujur yang menyebabkan hak dan kewajiban si istri berpindah dari keluarganya ke keluarga suaminya.

Sistem kekeluargaan patrilineal ini di Indonesia antara lain terdapat di Batak, Ambon, Irian, Bali, Lampung. Dalam sistem kekeluargaan matrilineal, bahwa masyarakat dalam menarik garis keturunan ke atas menghubungkan diri pada garis ibu, dari ibu ke ibu dan seterusnya sampai kepada perempuan yang mereka anggap sebagai nenek moyang mereka. Setelah perkawinan terjadi maka si suami turut berdiam di rumah si istri atau keluarganya. Tetapi si suami sendiri tidak masuk ke dalam kekeluargaan ibunya saja, dan tidak masuk ke dalam kekeluargaan bapaknya. Sistem kekeluargaan matrilineal ini dapat dijumpai

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur Bandung, Jakarta. 1980 hal 10

pada masyarakat Minangkabau. Sistem kekeluargaan yang bersifat parental adalah keluarga dalam menarik garis keturunan akan menghubungkan dirinya pada garis bapak dan ibunya. Dalam sifat kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara suami dan istri mengenai kedudukannya dalam keluarga masing-masing, artinya si suami menjadi anggota keluarga si istri demikian pula sebaliknya. Kekeluargaan yang bersifat parental ini antara lain terdapat di Jawa, Madura, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Lombok.²

Masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua golongan adat yang dikenal selama ini, yaitu beradat Lampung Pesisir dan beradat Lampung Pepadun. Pada dasarnya bentuk perkawinan yang diterapkan sama. Hanya saja pada masyarakat adat Lampung Pepadun penerapannya masih kental dilakukan, baik pada masyarakat yang tinggal di perkotaan atau yang tinggal di pedesaan. Pada masyarakat adat Lampung Pesisir dewasa ini penerapannya sudah berkurang, terutama pada masyarakat yang sudah tinggal di perkotaan. Mereka sudah banyak dipengaruhi hukum Islam.

Pada prinsipnya perbedaan itu hanya meliputi hal-hal yang kecil saja, misalnya dari segi bahasa masing-masing yang umumnya dibagi dalam dialek nyow (pepadun) dan dialek Api (pesisir). Namun dalam pergaulan atau percakapan dapat saling mengerti.³ Pada masyarakat Lampung Pepadun hanya mengenal bentuk perkawinan jujur, karenanya dalam masyarakat adat

² Ibid., hal 11

³ M. Adnan Bahsan, Zulchilal Bahsan dan Badri Bahsan, *Pelestarian Nilai-nilai Adat dan Upacara Perkawinan Adat Lampung Pesisir* (Makalah disampaikan pada Dies Natalis Universitas Lampung, Tanjung Karang, 1982), hal. 6

Lampung Pepadun tidak ada bentuk Perkawinan semenda. Sebaliknya pada masyarakat Lampung Pesisir dikenal dua bentuk perkawinan, yaitu perkawinan jujur dan perkawinan semenda.

Lampung Pesisir terdiri dari dua jalur adat yaitu Lampung Pesisir Semaka dan Lampung Pesisir Teluk, sedangkan Lampung Pepadun terdiri dari Pubian Telu Suku, Abung Siwo Mego, Tulang Bawang Mego Pak, Waykanan Lima Kebuayan, dan Bunga Mayang/ Sungkai.

Sistem Perkawinan menurut paham ilmu bangsa-bangsa (etnologi) dilihat dari keharusan dan larangan mencari calon istri bagi setiap pria, Maka perkawinan itu dapat berlaku dengan sistem endogamy, exogami, dan dengan sistem eleutrogami, sebagaimana berlaku di banyak masyarakat adat terutama yang banyak dipengaruhi hukum islam.⁴ Dilingkungan masyarakat Batak di bagian utara yang sebagian besar menganut agama Kristen, masih tetap mempertahankan susunan kekerabatan yang sifatnya *asymmetrisch connubium*, maka sistem perkawinan yang dianut adalah “exogami”, dimana seorang pria harus mencari calon istri di luar marga (klen patrilineal) dan dilarang kawin dengan wanita yang semarga. Sistem perkawinan ke luar marga ini sudah luntur di daerah Tapanuli Selatan, Minangkabau, Sumatera Selatan, Lampung dan beberapa daerah lain seperti di Maluku, Buru, dan Seram. Antara lain yang menjadi sebab adalah masuknya pengaruh ajaran hukum islam.

Ada kemungkinan di beberapa daerah masih terdapat sistem

⁴ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan azas-azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung.1971, hal 167

perkawinan “endogamy”, Dimana seorang pria diharuskan mencari calon istri dalam lingkungan kerabat (suku, klen, famili) sendiri dan dilarang mencari ke luar dari lingkungan kerabat, yang dimasa lampau nampaknya berlaku di daerah Toraja Sulawesi Tengah atau dikalangan masyarakat kasta di bali. Di masa sekarang nampak kecendrungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan exogami atau endogami, walaupun disana sini masih nampak adanya keinginan golongan tua untuk tidak menghilangkan sama sekali sistem demikian walaupun tidak secara sempurna, oleh karena hanya diperlakukan untuk kepentingan kekerabatan dan harta warisan, misalnya di kalangan orang Lampung yang menghendaki agar anak tunggal atau anak tertua lelaki tidak mencari calon istri atau calon suami dari bukan orang Lampung, bahkan dianjurkan mencari calon istri atau suami dari kalangan anggota kerabat terdekat.

Sistem perkawinan yang dewasa ini banyak berlaku adalah sistem “eleutherogami”, dimana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari calon istri di luar atau di dalam lingkungan kerabat/suku melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat (nasab) atau periparan (musyawarah) sebagaimana ditentukan oleh hukum islam atau hukum perundang-undangan yang berlaku. Dikalangan anggota keluarga masyarakat adat kekerabatan yang telah maju orang tua atau keluarga telah dikalahkan oleh muda-mudi yang tidak lagi mau terikat dengan kehendak orang tua atau keluarga, tidak lagi membedakan asal-usul masyarakat adat seseorang untuk melakukan perkawinan, sehingga banyak sudah terjadi

perkawinan campuran antar suku, bahkan antar golongan penduduk, walaupun jumlahnya masih belum begitu besar, tetapi lambat laun hal itu akan dianggap soal yang biasa saja.⁵ Sistem perkawinan endogami yaitu mengadakan perkawinan satu sama lain di dalam clan mereka sendiri (antar keluarga, karena hal ini dipandang dari segi sudut keamanan dan pertahanan, pemilikan tanah, kebun, sawah, Serta dipandang dari segi sudut Kemurnian darah/keturunan dan lain-lain pantangan yang bersifat magis religius.⁶

Dahulu pada masyarakat Lampung mengenal sistem perkawinan Endogami yaitu perkawinan yang tidak membolehkan seorang pria atau pun seorang wanita menikah dengan seorang yang berasal dari luar suku Lampung atau yang berasal dari luar Clannya, oleh sebab itu maka perkawinan yang terjadi hanya diantara mereka saja maksudnya antara orang Lampung dengan sesama Lampung, sehingga menyebabkan adanya kebiasaan yang timbul menjadi sebuah norma bahwa orang Lampung harus menikah hanya dengan orang Lampung saja.

Tetapi pada saat ini dengan berkembangnya zaman dan suku lain seperti suku Jawa telah masuk ke wilayah atau pemukiman suku lampung, maka terjadilah pergaulan antar suku, dan saat ini telah banyak Muli (gadis) Lampung Pepadun menikah dengan Bujang yang bukan bersuku Lampung Pepadun, dan begitu pula sebaliknya Mekhanai (Bujang) Lampung Pepadun menikah dengan gadis yang bukan bersuku Lampung.

Masyarakat Lampung tidak lagi mengenal perkawinan anak-anak,

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat istiadat dan Upacara Adatnya* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 69

⁶ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hal 21.

dimana laki-laki dan perempuan masih berstatus anak-anak (Lampung :sanak). Sampai dengan saat sekarang, masih tetap berlaku ketentuan bahwa perkawinan itu hanya dapat dilakukan diantara anggota masyarakat yang tidak sesuku (“bilik”), juga masih berlaku ketentuan bahwa perkawinan itu hanya dapat dilangsungkan antara mereka yang serumpun (“sama-sama anggota masyarakat lampung”). Tetapi ketentuan ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perkawinan dengan orang luar masyarakat itu, dengan cara melalui pengangkatan menjadi anggota masyarakat itu.⁷

Masyarakat Lampung dibedakan menjadi dua yaitu masyarakat Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin. Pada masyarakat Lampung Saibatin tidak dikenal adanya pengangknan, pada masyarakat adat Lampung Saibatin hanya ditentukan bahwa mereka harus menikah dengan orang yang beragama yang sama. Sedangkan pada masyarakat adat Lampung Pepadun jika terjadi perkawinan antar suku maka calon istri atau calon suami yang berasal dan suku lain harus dilakukan cara pengangknan (pengangkatan) terlebih dahulu sebelum menikah calon suami atau calon istri yang berasal dari luar suku Lampung harus dijadikan warga adat Lampung dahulu, sehingga dia mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga adat Lampung Pepadun karena hal ini terjadi dan sebagai manusia kita tidak boleh memaksakan kehendak dari apa yang telah dianugrahkan Allah SWT kepada kita, maka untuk tidak menghilangkan adat istiadat/ norma Titha adat (tetua adat) Lampung yang terdahulu, pada masyarakat Lampung dikenal

⁷ Soerjono Soekanto dan B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali, Jakarta, 1983. hal. 242

dengan adanya Pengangkongan. Dari uraian diatas maka penulis ingin mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan Pengangkongan, yang akan penulis teliti dalam bentuk tesis yang berjudul :

“PELAKSANAAN PENGANGKONAN (PENGANGKATAN ANAK)
DALAM PERKAWINAN BEDA SUKU PADA MASYARAKAT LAMPUNG
PEPADUN DI DESA NEGERI SAKTI KABUPATEN PESAWARAN”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengangkongan (pengangkatan anak) pada masyarakat Lampung Pepadun dalam proses perkawinan beda suku?
2. Bagaimana kedudukan seseorang yang telah diangkon (diangkat) dalam masyarakat Lampung Pepadun?

C. Tujuan Penelitian

Dari Permasalahan-Permasalahan di atas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengangkongan pada masyarakat Lampung Pepadun.
2. Untuk mengetahui kedudukan seseorang yang telah diangkon dalam masyarakat adat Lampung Pepadun.

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaaimana tersebut di atas maka

diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat atau kontribusi sebagai berikut:

1. Praktis

Bagi masyarakat luas lebih memahami ataupun lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan pengankonan (pengangkatan anak) dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran

2. Teoritis

Penelitian ini memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat perkawinan dan pengankonan (pengangkatan).

E. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulisan tesis ini disusun secara sistematis terbagi atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis akan menguraikan pengertian masyarakat hukum adat, macam-macam masyarakat adat, tinjauan umum tentang perkawinan, bentuk perkawinan pada masyarakat adat,

hubungan hukum perkawinan, pengertian pengangkatan anak, tujuan pengangkatan anak, Syarat pengangkatan anak, Tata cara pengangkatan anak, hubungan anak dan kerabat.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sample, serta analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pengangkatan (pengangkatan anak) dalam masyarakat Lampung Pepadun pada perkawinan beda suku: Kedudukan seseorang yang telah diangkat menjadi warga adat Lampung Pepadun dalam keluarga dan dalam adat. Pada Masyarakat Lampung Padian di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis terhadap penelitian dan pembahasan pada bab empat sedangkan saran-saran dilakukan sebagai pertimbangan untuk diadakan perbaikan-perbaikan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Adat

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Dalam perkembangan masyarakat merupakan komunitas manusia yang terhimpun dalam sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan didalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud.⁸

Pengertian masyarakat hukum adat jika merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, dimana perilaku kelakuan tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap.⁹

Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari para penguasa adat. Pada dasarnya masyarakat adat terbagi menjadi empat:

⁸ Soerjono Soekanto dan Soleman B Toneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1981. hal 106

⁹ Soleman B Toneko, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Erasco. Bandung, 1981. hal 49

Pada dasarnya masyarakat adat terbagi menjadi empat:

1. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan (Patrilineal) adalah kekerabatan yang mengutamakan keturunan menurut garis keturunan laki-laki.
2. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan (Matrilineal) adalah kekerabatan yang lebih mengutamakan keturunan menurut garis wanita.
3. Masyarakat adat yang bersendi keibu Bapakan (Parental) adalah kekerabatan yang menarik garis keturunan dari Ibu dan Bapak.
4. Masyarakat adat yang bersendi kebapakan beralih (Altemerend) adalah kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki namun adakalanya mengikuti garis keturunan wanita karena adanya pengaruh dari faktor lingkungan, waktu dan tempat.¹⁰

2. Macam-macam Masyarakat Adat

Macam-macam masyarakat adat di Indonesia dibagi menjadi 3, antara lain:

1. Masyarakat hukum teritorial

Masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, hal 23

sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.

Para anggota masyarakat merupakan anggota dalam kesatuan yang teratur baik keluar maupun kedalam. Diantara anggota yang pergi merantau untuk waktu yang sebentar masih berlaku anggota kesatuan teritorial itu.

2. Masyarakat hukum genealogis

Masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu keturunan yang sama dari leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan atau pertalian adat. Menurut para ahli hukum adat dimasa Hindia Belanda masyarakat yang genealogis dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan bilateral.

3. Masyarakat teritorial genealogis

Pada dasarnya masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang tetap dan teratur adalah masyarakat yang teritorial, sedangkan masyarakat yang genealogis semata-mata dapat dikatakan tidak ada kehidupan manusia yang tergantung pada tanah (bumi) tempat ia dilahirkan, bertempat kediaman hidup dan mati. Namun dikarenakan

adanya kesatuan masyarakat seperti di Indonesia ini yang pergaulan hidupnya tidak semata-mata bersifat ketetanggaan tetapi juga bersifat kekerabatan dengan dasar pertalian darah (Patrilineal, Matrilineal, Bilateral), maka yang disamping bersifat teritorial, banyak juga kesatuan-kesatuan masyarakat yang sifatnya teritorial genealogis.

Jadi yang dimaksud masyarakat hukum teritorial genealogis adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman daerah tertentu tapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan.

Dengan demikian didalam suatu daerah dimana terdapat masyarakat yang teritorial genealogis, akan berlaku dualisme atau pluralisme hukum yaitu hukum administrasi pemerintah berdasarkan perundangan, hukum adat, (yang baru) yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa bersangkutan dan hukum adat yang berbeda pada pergaulan masyarakat yang campuran.¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah suatu hubungan suami istri yang bermaksud untuk mendapatkan keturunan dikemudian hari dan kelak akan meneruskan kekerabatan orang tuanya. Disamping itu ada

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Mandar Maju. Bandung.1992, hal 106.

kalanya suatu perkawinan merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat dan begitu pula perkawinan bersangkutan paut dengan warisan, kedudukan dan harta perkawinan. Maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa perkawinan sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena perkawinan bukan merupakan kepentingan kedua mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara bahkan keluarga dan kerabat mereka masing-masing.

2. Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat terdapat tiga sistem perkawinan yang berlaku untuk kalangan orang-orang Indonesia asli:

1) Sistem Endogami

Sistem ini hanya memperbolehkan seseorang menikah dengan rang-orang dari keluarganya sendiri contohnya daerah Toraja.

2) Eksogami

Dalam sistim ini seseorang hanya diperbolehkan melakukan suatu perkawinan dengan seseorang dari luar suku keluarganya, contohnya adat pada masyarakat lampung, Batak Gaya, Buru, Seram dan lain-lain

3) Eleutherogami

Dalam sistem ini tidak ada larangan-larangan seperti kedua sistem di atas oleh sebab itu eleutherogami hanya terdapat pada masyarakat Indonesia. Contohnya di Aceh, Kalimantan dan Sumatera Selatan

Sistem perkawinan yang banyak berlaku sekarang adalah *eleuthergami*, dimana pria tidak lagi dilarang untuk mencari calon diluar atau didalam lingkungan kerabat dan suku melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat.¹²

Tidak terlihat lagi kecendrungan untuk mempertahankan sistem *eksogami* atau *endogami*. Walaupun masih nampak adanya keinginan orang tua untuk tidak menghilangkan sama sekali sistem tersebut. Oleh karena hanya diperlakukan untuk kepentingan kekerabatan atau sistem pembagian warisan. Misalnya dikalangan masyarakat Lampung yang mengharapkan anak tertua lelaki tidak mencari istri dari bukan orang lampung, bahkan dianjurkan mencari pendamping hidup dari kalangan kerabat terdekat.

3. Bentuk Perkawinan pada Masyarakat adat

Karena susunan masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda, maka bentuk perkawinan yang berlaku berbeda pula. Antara lain :

1. Perkawinan jujur

Perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang jujur oleh pihak wanita maka berarti setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukan ke dalam keanggotaan kekerabatan suami untuk

¹² Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum adat*. PT. Gunung Agung, Jakarta, 1967, Hal. 132.

selama ia mengikat diri dalam perkawinan itu atau selama hidupnya.¹³

Perkawinan jujur hanya dikenal dalam sistem kekerabatan patrilineal yaitu suatu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan laki-laki. Dengan kata lain sistem kekerabatan patrilineal mewujudkan adanya hubungan pertalian darah yang mengutamakan garis keturunan laki-laki.

“Bahwa prinsip keturunan patrilineal adalah yang menghitung kekerabatan melalui oaring laki-laki saja dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi setiap individu di dalam masyarakat semua kaum kerabat ayah masih di dalam batas hubungan kekerabatannya. Sedangkan semua kerabat ibunya jatuh di luar batas itu”.¹⁴

Jadi dari pernyataan tersebut jelaslah sudah bahwa kaum laki-lakilah yang memegang peranan. Sehingga dalam jabatan-jabatan adapun dikuasai oleh pihak laki-laki. Dan bila orang tuanya meninggal maka secara otomatis ia akan menggantikan kedudukan orang tuanya. Hal tersebut masih berlaku hingga sekarang dan berlaku hingga sekarang dan berlaku turun-temurun. Dalam hal ini kedudukan seorang suami lebih tinggi daripada kedudukan istri. Istri sebagai pendamping dan pembantu suami dalam menegakkan rumah tangga dan suami adalah kepala keluarga dalam rumah tangga.

Ada beberapa variasi dalam bentuk perkawinan jujur, yaitu:

a) Perkawinan ganti suami

- 1) Terjadinya perkawinan ganti suami (leviraat huwelijk) ini dikarenakan suami wafat. Namun pembayaran uang jujur tidak diperlukan lagi karena istri masih tetap berada dalam lingkungan kerabat suaminya

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. Alumni. Bandung, 1983, hal.73

¹⁴ Soekanto, Soerjono dan soleman B Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, 1983, hal.59

- 2) Perkawinan ganti istri (*vervolg huwelijk*) ini adalah kebalikan dari perkawinan *liveraat* yaitu dikarenakan istri wafat maka suami kawin dengan saudara istrinya yang wafat itu. Pembayaran uang jujur juga tidak diperlukan lagi karena jujur telah diberikan ketika mengambil istri yang wafat.
- b) Perkawinan mengabdikan (*dienhuwelijk*) terjadi karena ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak dapat memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak perempuan, sedangkan pihak laki-laki atau kedua pihak tidak menghendaki perkawinan semanda lepas. Oleh karena itu, setelah perkawinan suami akan terus-menerus bertempat di kediaman atau berkedudukan di pihak kerabat istrinya. Uang jujur tidak perlu dilunasi karena pihak laki-laki tersebut dianggap telah melunasinya dengan mengabdikan kepada kerabat istrinya. Bentuk pengabdian ini misalnya membantu pekerjaan mertua dalam pertanian, perdagangan atau mengurus adik-adik istri sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri.
- c) Perkawinan ambil beri (*ruilhuwelijk*) adalah perkawinan yang terjadi diantara kerabat A mengambil istri dari kerabat B dan pada masa lain kerabat B mengambil istri dari kerabat A, dilakukan di Lampung, ambon, Sulawesi Selatan bagian Timur, Pulau Sawu dan Irian Barat.
- d) Perkawinan ambil anak (*inlifhuwelijk*) adalah perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mempunyai anak wanita (tunggal) maka anak wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabat) untuk menjadi suaminya dan

mengikuti kerabat istri untuk selama perkawinannya guna menjadi penerus keturunan pihak istri.

2. Perkawinan Semanda

Adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan suami masuk dalam kekerabatan si istri dan bertanggung jawab dalam meneruskan keturunan dipihak istri. Perkawinan semanda dalam arti sebenarnya adalah suatu perkawinan dimana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan dipihak istri dan melepaskan hak dan kedudukan di pihak kekerabatannya sendiri.

Bentuk perkawinan semanda terdapat di daerah mingangkabau yang susunan kekerabatannya matrilineal, di daerah Rejang Lebong Bengkulu yang susunan kekerabatannya Alternierend atau teralih-alih menurut perkawinan orang tua, di daerah Sumatera Selatan, Lampung pesisir atau juga di tempat-tempat lain seperti perkawinan "ambil piara" di Ambon.

Dalam perkawinan semanda kedudukan suami lebih rendah daripada kedudukan istri. Suami sebagai pembantu istri dalam menegakkan rumah tangga dan mempertahankan serta meneruskan keturunan istri. Disini istri yang memegang kendali dalam urusan rumah tangga, keluarga serta kerabat.

3. Perkawinan Mentas

Dalam perkawinan ini yang penting adalah persetujuan kedua orang

tua atau wali dari pria dan wanita serta persetujuan dari mereka berdua yang akan menikah. Dalam rumah tangga, antara suami dan istri mempunyai kedudukan yang seimbang baik dalam harta benda maupun pergaulan di antara keduanya. Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam perkawinan mentas, orang tua atau keluarga hanya bersifat membantu karena kedua suami istri tersebut sudah dianggap mampu untuk membina rumah tangga sendiri.¹⁵

C. Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak/Adopsi

Untuk memberikan pengertian tentang adopsi, kita dapat membedakannya dari dua sudut pandangan, yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi.¹⁶

a. Secara Etimologi

Adopsi berasal dari kata “adoptie” bahasa Belanda, atau “adopt” (adoption) bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.

Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus Hukum, berarti “pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri”. Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 89

¹⁶ Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4

pengertian secara *literlijk*, yaitu (adopsi) disadurkan ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

b. Secara Terminologi

Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi adopsi, antara lain:

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”.

Dalam ensiklopedia Umum disebutkan:¹⁷

Adopsi suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan Perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Hilman Hadi Kusuma:¹⁸

“Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi oleh orang tua angkat dengan

¹⁷ Ibid, hal 5.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. hal 149

resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga”.

Sedangkan Soerojo Wignjodipoero, memberikan batasan sebagai berikut:

Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹⁹

Menurut hukum adat, pada umumnya hampir seluruh masyarakat dilingkungan hukum adat mengenal masalah pengangkatan walaupun mempunyai variasi yang berbeda-beda satu sama lainnya, pada awalnya salah satu tujuan yang dominan dari pengangkatan adalah untuk dijadikan anak apabila dalam suatu perkawinan tidak mempunyai keturunan, namun berdasarkan perkembangan masyarakat hingga sekarang ini, tujuan dari pengangkatan tidak lagi hanya untuk meneruskan keturunan, tetapi mempunyai motivasi dan berbagai pendorong lainnya. motivasi dan pendorong dilakukannya pengangkatan itu diantaranya adalah pengangkatan pada seseorang yang mempunyai kedudukan dan kemudian orang tersebut diberi gelar adat, pendorong lainnya yaitu pengangkatan pada seseorang yang berada di luar suku (Lampung) yang dijadikan

¹⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas hukum adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, hal 117

anak ataupun dijadikan sebagai seorang adik dalam suatu keluarga (masyarakat adat) untuk terciptanya suatu peristiwa hukum adat.

2. Pengangkatan Anak (adopsi) Dalam Hukum Adat

Tujuan perkawinan sebenarnya bukan hanya sekedar untuk memperoleh anak, akan tetapi diharapkan supaya anaknya itupun punya anak untuk menyambung keturunannya.

Menurut Soerjono Soekanto pengertian anak angkat pada dasarnya adalah orang lain (dalam hubungan yang sah) menurut hukum adat dan agama yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.

Kemudian Hilman Hadikusuma mengklasifikasikan anak angkat pada masyarakat Lampung menjadi 2 yaitu :

- a. Anak angkat tegak tegi
- b. Anak angkat adat

Secara hukum adat pengangkatan anak untuk dua klasifikasikan di atas harus melalui upacara adat. Perbedaan kedudukan anak angkat tegak tegi dan anak angkat adat, adalah pada anak angkat tegak tegi karena kedudukannya sebagai penerus keturunan bagi keluarga yang putus keturunan bagi keluarga yang putus keturunan adalah ahli waris bagi bapak angkatnya, sedangkan anak angkat adat karena seseorang diupacarakan dan masuk menjadi warga Lampung.

Lebih lanjut Hilman Hadikusuma menyebutkan alasan pengangkatan anak tersebut adalah:

- a. Karena tidak mempunyai anak;
- b. Karena tidak ada penerus keturunan;
- c. Karena adat perkawinan setempat;
- d. Karena hubungan baik dan tali persaudaraan;
- e. Karena kebutuhan tenaga kerja

Dalam hukum adat dikenal 2 macam pengangkatan anak yaitu :

- a. pengangkatan anak secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, Pemuka adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai).
- b. Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara dian-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya, hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri oleh pemuka adat/desa dan tidak dengan pembayaran uang adat.

Perbedaannya adalah:

- a) Akibat hukum Pengangkatan anak secara terang dan tunai adalah anak angkat tersebut putus hubungan hukum dengan orang tua aslinya masuk menjadi keluarga angkatnya serta mewaris dari orang tua asalnya.
- b) Akibat hukum Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai anak angkat tersebut tidak putus hubungan hukum dengan

orang tua aslinya walaupun bertempat tinggal dan dipelihara keluarga orang tua angkatnya serta mewaris dari orang tua asalnya.

3. Pengangkatan Anak Menurut PP RI. No.54 Tahun 2007

Dengan adanya Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan anak.

Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Pengertian Pengangkatan Anak menurut PP RI. No.54 Tahun 2007 adalah: suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

4. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak di Indonesia ditinjau dari segi hukum adat berdasarkan penjelasan dan sumber literatur yang ada terdapat 14 macam motivasi dari pengangkatan anak:

1. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang lumrah karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak dikaruniai keturunan hanyalah dengan cara mengangkat anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan menyemarakkan rumah tangga bagi pasangan suami istri.
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberi nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang positif karena disamping membantu si anak guna masa depannya juga adalah membantu beban orang tua kandung si anak, asalkan didasari dengan kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung sendiri.
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu). Hal ini adalah memang suatu kewajiban moral bagi orang yang mampu, disamping sebagai misi kemanusiaan juga sebagai misi kemanusiaan juga sebagai pengamalan sila kedua dari Pancasila.
4. Sebagai pemancing bagi anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah motivasi yang logis karena pada umumnya orang ingin mempunyai anak laki-laki dan perempuan.
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk bisa mempunyai anak kandung. Motivasi ini erat hubungannya dengan kepercayaan yang

ada pada masyarakat.

6. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua angkat yang bersangkutan mempunyai kekayaan yang banyak misalnya banyak mempunyai tanah untuk digarap maupun harta lainnya yang memerlukan pengawasan atau tenaga tambahan untuk pengelolaannya.
7. Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik, motivasi ini juga erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
8. Karena faktor kepercayaan, pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkah atau tuah bagi orang tua yang mengangkat maupun diri anak yang diangkat, demi untuk kehidupannya bertambah baik.
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak angkat. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunannya.
10. Adanya hubungan keluarga, hal ini atas permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, Supaya dijadikan anak angkat.
11. Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Disini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat.
12. Ada juga karena merasa kasihan atas nasib anak separti tidak terurus. Pengertian tidak terurus bisa saja orang tuanya masih hidup, tapi karena tidak mampu atau tidak bertanggung jawab sehingga anak-anaknya menjadi terlantar.

13. Untuk mempererat hubungan keluarga, disini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat.
14. Karena anak kandung sering penyakitan atau selalu meninggal, maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan agar si anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang umur. Dari motivasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat hukum adat kita.

Dengan demikian maka pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang bernilai positif dalam masyarakat hukum adat kita dengan berbagai motivasi yang ada, sesuai dengan keanekaragaman masyarakat dan bentuk kekeluargaan di Indonesia.²⁰

5. Syarat Pengangkatan Anak

Syarat pengangkatan anak menurut hukum adat tidak ada keseragaman antara daerah hukum adat yang satu dengan yang lainnya. Secara umum syarat pengangkatan anak dapat dilakukan terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, sedangkan jumlah anak laki-laki maupun perempuan, sedangkan jumlah anak yang akan diambil sebagai anak angkat tidak dibatasi tergantung masing-masing pasangan suami istri yang akan mengangkat anak, juga tergantung dari segi kemampuan ekonomi dari pada orang tua angkat. Anak yang diangkat juga bisa anak tersebut masih bayi ataupun sudah dewasa, tetapi dalam kenyataannya pasangan suami istri yang mengangkat anak biasanya

²⁰ Muderis Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 1995. hal 63

diambil anak yang masih bayi. Lebih jelasnya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Mendapat persetujuan dari orang tua kandung calon anak angkat.
2. Keadaan kemampuan ekonomi orang tua yang akan mengangkat anak sangat memungkinkan dalam arti bahwa mereka nantinya dapat menjamin kehidupan masa depan anak angkatnya sehingga anak tersebut tidak terlantar hidupnya.
3. Apabila anak yang akan diangkat itu dapat berbicara dan mengerti maka harus ada persetujuan dari anak itu sendiri.
4. Mampu merawat, mendidik, mengasuh maupun memenuhi kebutuhan hidup anak angkat tersebut.
5. Bersedia untuk memperlakukan anak angkat seperti anak kandung sendiri.

Menurut hukum islam syarat-syarat pengangkatan anak sama seperti dalam pengangkatan anak menurut hukum adat, tetapi ada hal-hal yang tidak disebutkan dalam hukum adat yaitu bahwa pasangan suami istri yang mengangkat anak tidak boleh memutuskan hubungan darah dengan orang kandungnya, tidak boleh menjadi sebagai pewaris dari orang tua angkat, anak angkat tidak boleh memakai nama orang tua angkatnya tetapi harus tetap menggunakan nama dari orang tua kandungnya dan orang tua angkat tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Berdasarkan Pasal 12 PP RI. Nomor 54 Tahun 2007, Syarat-syarat Pengangkatan Anak, meliputi :

- (1). Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Merupakan anak terlantar atau anak ditelantarkan;
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuh anak; dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus
- (2). Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

6. Tata Cara Pengangkatan Anak

Di Indonesia, pengangkatan anak pada masing-masing daerah mempunyai cara yang berbeda-beda, sehingga dalam praktek sering terjadi kekeliruan atau tidak dapat dibedakan antara anak angkat dan anak pelihara. Di bawah ini kami akan menguraikan mengenai tiga macam pengangkatan anak yaitu :

1. Mengangkat anak bukan warga keluarga.
2. Mengangkat anak dari kalangan keluarga.
3. Mengangkat anak dari kalangan keponakan.

Ad. a. Yang dimaksud dengan mengangkat anak dari bukan keluarga yaitu bahwa anak tersebut diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat. Pada umumnya tindakan ini disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada

keluarga anak semula. Hal ini dilakukan dengan alasan khawatir akan punah garis keturunannya. Akibat bahwa anak angkat tersebut mempunyai hubungan hukum dengan keluarga angkatnya, sedangkan hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya menjadi putus. Contohnya : Nias, Gayo, Lampung, Kalimantan.

Ad. b Yang dimaksud dengan mengangkat anak dari kalangan keluarga yakni mengambil anak dari suatu kelompok yang ada hubungan tradisional atau yang disebut *purusa*. Di Bali mengambil anak dari lingkungan keluarga istri disebut dengan *prada*. Apabila istri tidak mempunyai anak, maka dilakukan pengangkatan anak dari selir-selir untuk dijadikan anak istrinya. Perbuatan pengangkatan anak dari kalangan keluarga ini di Bali disebut dengan “*Nyentanayang*”. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

- Orang atau laki-laki yang ingin mengangkat anak tersebut lebih dahulu harus membicarakan kehendaknya dengan keluarganya secara matang.
- Hubungan anak dengan ibu dan keluarganya secara adat harus diputuskan yaitu dengan cara membakar benang, yang menyatakan putusnya hubungan dengan keluarga, dan membayar menurut hukum adat sebesar seribu *keeping* disertai pakaian wanita lengkap, yang menyatakan hubungan anak dengan ibu menjadi putus.
- Kemudian anak dimasukkan dalam hubungan keluarga yang memungutnya yang istilahnya *diperas*.

- Selanjutnya diumumkan pada warga desa atau disebut siar.
- Dan setelah diberi ijin lalu dibuatkan akta yang disebut surat peras.

Hal ini dilakukan karena takut tidak mempunyai keturunan. Akibat hukum terhadap anak tersebut bahwa hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya menjadi putus.

Ad. c Yang dimaksud mengangkat anak dari kalangan keponakan ialah mengangkat anak keponakan menjadi anak sendiri. Hal ini merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan dalam lingkungan keluarga. Pada umumnya mengangkat anak keponakan menjadi anak sendiri ini tidak disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan-penyarahan sesuatu baraaang kepada orang tua dari anak yang bersangkutan. Pengangkatan anak ini banyak dilakukan di Jawa Timur, untuk memutuskan hubungan antara orang tua kandung dan anak yang bersangkutan biasanya sebagai syarat diserahkan uang sejumlah “Rong wang segobang” atau sama dengan tujuh belas setengah sen. Di Minahasa anak yang diangkat tersebut diberikan tanda kelihatan berupa tanah yang biasa disebut “Parade”, sebagai pengakuan bahwa anak tersebut telah dianggap seperti anak sendiri.²¹

Adapun sebab-sebab dari mengangkat anak keponakan menjadi anak sendiri adalah sebagai berikut:

1. Karena orang yang mengangkat anak keponakan tersebut tidak mempunyai keturunan .

²¹ Bastian Tafal. *Pengangkatan Anak menurut hukum adat, serta akibat-akibat hukumnya dikemudian hari*. CV. Rajawali, Jakarta, 1983. hal 47.

2. Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan memungut anak keponakan ini merupakan pancingan supaya cepat mendapat keturunan.
3. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk membiayai hidupnya.

Kemudian untuk sahnya pengangkatan anak tersebut menurut hukum adat ada dua cara:²²

1. Umum
2. Khusus

Kecuali itu ada hal-hal yang menyerupai pengangkatan anak.

Ad. a Yang umum

Terhadap cara yang umum ini, pengangkatan anak dapat dibagi lagi menjadi dua macam yaitu :

1. Dilakukan secara terang dan tunai.
2. Dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai.

Terang maksudnya perbuatan pengangkatan anak tersebut dilakukan dimuka pemuka adat dan disaksikan oleh masyarakat setempat.

Tunai maksudnya pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan pemberian barang-barang berkasiat kepada keluarganya semula menurut hukum adat setempat. Kemudian dengan pemberian barang-barang tersebut putuslah hubungan dan ikatan dengan keluarga semula. Dan anak

²² Soimin, Soedharyo. *Himpunan Dasar Pengangkatan Anak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2000. hal 76.

tersebut menjadi anggota baru dari keluarga yang mengangkatnya. Pengangkatan anak seperti ini banyak terjadi di daerah Nias, Gayo dan Lampung, dimana susunan masyarakatnya dalam bentuk clan. Dengan demikian pengangkatan anak disini tidak hanya menjadi urusan dari keluarga yang bersangkutan saja, tetapi juga merupakan urusan dari clan yang mengambil anak tersebut. Oleh karena itu anak yang diangkat berasal dari clan orang yang mengangkat.

Tidak terang dan tidak tunai

Tidak terang dan tidak tunai maksudnya adalah ; untuk pengangkatan anak tersebut tidak diperlukan suatu cara tertentu, sehingga tidak perlu adanya campur tangan dari anggota keluarga atau kepala desa agar pengangkatan anak tersebut menjadi terang atau dengan pembayaran kepada asal anak yang diangkat. Hal ini biasanya terjadi di Jawa dan Sulawesi Selatan.

Adapun perbuatan tersebut bukan berarti bahwa anak yang diangkat tanpa perbuatan terang dan tunai, dalam kehidupan sosialnya lalu tidak dianggap sama sebagai anak kandung orang tua angkatnya. Bahkan dalam perihal waris, anak tersebut mendapat air dari dua sumber yaitu anak itu tetap sebagai ahli waris dari keluarga asalnya dan dari keluarga yang mengangkatnya meskipun hanya meliputi gono-gini saja. Dengan adanya pengangkatan anak yang terakhir ini berlaku aturan bahwa seseorang anak angkat tidak hanya dianggap sebagai anak peliharaan saja, apabila orang tua yang mengangkatnya menganggap atau memandang secara lahir dan batin sebagai anak kandungnya sendiri maka anak tersebut

juga disebut sebagai anak angkat.

Ad. b Yang khusus

Pengangkatan anak disini mempunyai cara bermacam-macam dan merupakan penerobosan peraturan hukum adat.

Dibawah ini akan kami uraikan mengenai macam-macam cara pengangkatan anak yang khusus yang terdapat pada masalah waris saja yaitu terdapat di daerah-daerah :

1. Di Bali, yang disebut dengan pengangkatan anak sentana yaitu suatu pengangkatan anak yang dilakukan terhadap anak perempuan sendiri dan dengan pengangkatan anak perempuan sendiri dan dengan pengangkatan anak tersebut ia memperoleh hak-hak dan kewajiban seperti halnya anak laki-laki tertua. Hal ini dilakukan berhubung di Bali yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki, di samping itu juga untuk melanjutkan kedudukan sebagai kepala keluarga. Perbuatan ini dilakukan dalam warga yang tidak terdapat anak laki-laki.
2. Di Rejang, yang disebut dengan “Mulang Jurai” ialah mengangkat anak tiri yaitu anak dari istrinya oleh suami yang tidak mempunyai anak sendiri. hal ini dilakukan jikalau ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia. Di Kalimantan kebiasaan demikian disebut dengan “Ngukup Anak” yaitu yang terdapat dikalangan orang Dayak Maayan Siung.²³

²³ Hilman Hadikusuma, Op.cit. hal 150

3. Di Lampung yang disebut dengan “Tambi Anak” yaitu anak perempuan dijadikan seolah-olah anak laki-laki dengan jalan kawin semendo yaitu dengan laki-laki di luar kurungnya. Kemudian dengan perkawinan tersebut terselip pengangkatan anak. Akibat dari tambu anak tersebut, anak angkat mewaris dari mertua untuk keperluan anak dan istrinya, tetapi dalam prakteknya dengan adanya semendo tadi, perempuan tetap berkuasa, meskipun dalam hukum ditentukan manantu yang berkuasa.

Lawan dari pada tambu anak yaitu Tegak Tegi dimana laki-laki diambil dari anggota kurungnya. Dengan perkawinan tersebut maka menantu menjadi anak angkat dan mewaris dari mertua untuk kepentingan anak dan istrinya. Disamping adanya pengangkatan anak karena tidak punya anak, dapat pula dilakukan sebagaimana berlaku di daerah Lampung atau juga di daerah Batak, yaitu pengangkatan “Anak Adat” dalam hubungan dengan adat memasukkan menjadi warga adat (“Mewari”, Lampung). Kedudukan anak adat ini hanya merupakan suatu pengakuan dan pengesahan sebagai warga adat persekutuan, jadi yang bersangkutan, jadi yang bersangkutan bukan sebagai waris dari orangtua yang mengangkatnya, melainkan dikarenakan pengangkatan itu si anak mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga adat persekutuan lainnya.²⁴

4. Dibatak yang disebut dengan “Kahang Dipulut” atau “Kahang

²⁴ Ibid

Diangkat” yaitu dengan suatu upacara tertentu maka orang asing dapat dianggap sebagai anggota keluarga atau sebagai kahanggi. Pengangkatan anak disini tidak mempunyai akibat dalam hal kewarisan, hanya mempunyai hak dalam urusan kemasyarakatan.

5. Di Minagkabau yang disebut dengan “Anak Kemenakan Bertali Adat” yaitu menjadi anggota suku karena adat, jadi bukan karena keturunan saudara. Dalam hal ini tidak mempunyai akibat dalam hukum kewarisan dan hanya berakibat mempunyai hak dalam urusan kemasyarakatan saja.

D. Hubungan Anak dan Kerabatnya

1. Pertalian Darah

Dalam susunan kekerabatan yang pertalian darahnya lebih mengutamakan keanggotaan kerabat menurut garis keturunan laki-laki, maka semua anggota kerabat merasa mempunyai hubungan kewangsaan yang akrab dari satu poyong (keturunan) asal pendiri kesatuan keturunannya, sedangkan anak-anak perempuan adalah pembuah dari keturunan laki-laki yang kedudukannya di bawah pengaruh kekuasaan ayahnya dan saudara-saudara laki-laki ayahnya, dan apabila ia kawin mengikuti suaminya ia berada dibawah pengaruh kekuasaan suami dan saudara-saudara suaminya.

Anak dalam kekerabatan yang menganut garis keturunan bapak ibu, maka hubungan anak dengan keluarga dari pihak bapak ataupun dengan

keluarga dari pihak ibu adalah sama eratnya ataupun derajatnya. Dalam susunan kekeluargaan yang bilateral demikian ini, maka masalah-masalah tentang larangan kawin, warisan, kewajiban memelihara dan lain-lain hubungan hukum terhadap kedua belah pihak kekeluargaan adalah sama kuat.

2. Pertalian Perkawinan

Hubungan dan kedudukan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan hasil perkawinan yang sah dalam perkawinan bahwa anak laki-laki terhadap orang tuanya dalam kekerabatan patrilineal, dapat pula dilihat dari latar belakang sah tidaknya perkawinan orang tuanya serta bentuk perkawinan orang tuanya dan bentuk perkawinannya sendiri. Begitu pula jika ayahnya mempunyai beberapa istri, maka kedudukan anaknya pun dipengaruhi kedudukan ibunya. Kemudian bagaimana kedudukannya jika si anak adalah anak tiri yang dibawa ibunya atau dibawa ayahnya kedalam perkawinan mereka.

Pada hakekatnya baik menurut Undang-Undang maupun menurut sah atau tidaknya anak dilihat dari kenyataan yuridis bukan berdasarkan kenyataan biologis, jika si anak lahir mempunyai bapak-ibu dalam ikatan perkawinan yang sah maka anak itu sah walaupun mungkin perkawinan orang tuanya hanya menutup malu, anak tersebut tidak sah.

Dari uraian di atas tidak mengikat anak tersebut anak laki-laki atau anak perempuan dari kekerabatan/ pertalian perkawinan patrilineal maupun matrilineal.

3. Pertalian Adat

Hubungan anak dengan orang tua karena pertalian adat yang dimaksud adalah hubungan anak bukan anak kandung, yang terjadi karena adanya hubungan perkawinan orang tua atau karena adanya pengangkatan anak adat atau anak akuan.

Menurut F. St Nyinang Marga²⁵, menyatakan bahwa hukum adat bagi anak langsung merupakan dasar pijakan bagi masyarakat langsung berlaku sejak adanya anak keturunan.

Anak karena adanya hubungan pengangkatan adalah karena mempunyai anak perempuan tidak mempunyai anak laki-laki lalu mengangkat anak laki-laki orang lain atau mengangkat anak karena hubungan baik. Sedangkan anak “Akuan” adalah anak orang lain yang diakui sebagai anak, misalnya “Anak Pungut” atau “Anak Piara”²⁶

Menurut hukum adat, pada umumnya hampir seluruh masyarakat di lingkungan hukum adat mengenal masalah pengangkatan walaupun mempunyai variasi yang berbeda-beda satu sama lainnya, pada awalnya salah satu tujuan yang dominan dari pengangkatan adalah untuk dijadikan anak apabila dalam suatu perkawinan tidak mempunyai keturunan. Namun berdasarkan perkembangan masyarakat hingga sekarang ini, tujuan dari pengangkatan tidak lagi hanya meneruskan keturunan tetapi mempunyai motivasi dan berbagai pendorong lainnya motivasi dan pendorong

²⁵ ST. Nyinang Marga, Firmansyah, *Diktat Adat Bujang Gadis Lampung Siwo Mego*, Lampung Tengah. 1990. hal 57.

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003. hal 146.

dilakukannya pengangkatan itu diantaranya adalah pengangkatan pada seseorang yang mempunyai kedudukan dan kemudian orang tersebut diberi gelar adat pendorong lainnya yaitu pengangkonn (pengangkatan) pada seseorang yang berada di luar suku Lampung yang dijadikan sebagai seorang anak atau adik dalam suatu keluarga (masyarakat Lampung) untuk tercapainya suatu peristiwa hukum adat.

Subjek yang terlibat dalam pengangkonn atau pengangkatan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Keluarga yang akan mengangkonn atau keluarga yang akan mengangkat seseorang yang berada di luar suku Lampung Pepadun menjadi Lampung Pepadun.
2. Seseorang yang berada di luar suku Pepadun yang akan diangkonn atau diangkat.
3. Anggota keluarga atau anggota masyarakat lain yang mendorong atau menghalangi dalam perbuatan pengangkonn ini.

Menurut Sayuti Ibrahim Kiyai Paksi²⁷, menyatakan bahwa macam-macam pengangkonn pada Masyarakat Lampung Pepadun yaitu:

1. Muakhi seangkonn (mengangkat seseorang sebagai saudara angkat) adalah orang Lampung Pepadun bersaudara dengan salah seorang dari suku lain di luar suku Lampung Pepadun.
2. Muakhi kebetikan adalah mengangkat seseorang sebagai saudara karena sudah terlampau baik dan seseorang itu bukan Lampung Pepadun.

²⁷ Sayuti Ibrahim, *Buku Handak II Mengenal Adat Lampung*. Gunung Pesagi, Bandar Lampung. 1995. hal. 87

3. Mengambil atau mengangkat anak perempuan atau adik perempuan dari suku lain di luar suku Lampung untuk dijadikan anak atau adik.
4. Mengambil atau mangangkat anak laki-laki atau adik laki-laki dari suku lain di luar suku Lampung untuk dijadikan anak atau adik.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah sebagai suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, karena

melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Methodos*” yang artinya adalah cara atau jalan. Dikaitkan dengan penelitian ilmiah maka metode menyangkut masalah kerja. Yaitu cara kerja untuk dapat memahami suatu obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Metode pendekatan

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang akan bertumpu pada data primer (hasil dari penelitian di lapangan) dan data sekunder.

Pendekatan yuridis yaitu meliputi hukum hanya sebagai hukum *in book*, yakni dalam mengadakan pendekatan, prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang masih berlaku dipergunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Pendekatan secara empiris yaitu suatu pendekatan yang timbul dari pola berpikir dalam masyarakat dan kemudian diperoleh suatu kebenaran yang harus dibuktikan melalui pengalaman secara nyata di dalam masyarakat.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris maksudnya yaitu disamping mempelajari peraturan-peraturan yang berpedoman pada segi-segi ilmu hukum terutama hukum adat, juga mempelajari masalah-masalah hukum yang terjadi dan hidup di lapangan. Hal ini sesuai dengan disiplin ilmu dalam penelitian ini, dimana menyangkut berlakunya hukum.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan mengenai pelaksanaan pengangkatan (pengangkatan anak) dalam perkawinan beda suku pada Masyarakat Lampung Pepadun Pubian di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan, untuk selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada pendapat para ahli hukum adat dan bahan pustaka yang relevan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung, khususnya masyarakat dan tokoh adat setempat .

D. Populasi dan Sampel

- Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Lampung Pubian

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001, hal. 57.

yang terkait dengan pengangkatan (pengangkatan anak) di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan.

- Sampling adalah bagian dari individu atau populasi yang akan diteliti. Dalam penulisan ini penulis dalam pengambilan sampel ditentukan melalui Purposive Sampling, yaitu penarikan sampel yang akan dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Adapun responden yang diambil dalam penelitian ini, antara lain:

- a) Anak yang diangkat atau diangkat : Drs. Yudha Rozali
- b) Kepala Keluarga yang mengangkat (mengangkat anak) : Drs. Nawawi SP
- c) Punyimbang (kepala adat) di Desa Negeri Sakti :
 - Usman Yusuf gelar Suttan Junjungan Suttan
 - Ismail gelar Pengiran Mantap

E. Jenis Dan Sumber Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data antara lain data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan melalui penelitian, yaitu dari pelaku masyarakat. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²⁹

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder:

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12.

- Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui interview (wawancara) yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Dalam wawancara tersebut, pertanyaan yang akan diajukan telah dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman agar wawancara tetap terarah tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.
- Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai langkah awal untuk memperoleh:
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti hukum adat perundang-undangan.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hukum perkawinan, hukum pengangkatan anak yang memberikan kejelasan terhadap penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus.³⁰

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari teknik pengumpulan data utama dan teknik pengumpulan data penunjang. Teknik pengumpulan data utama adalah peneliti sendiri sedangkan teknik pengumpulan data penunjang adalah daftar pertanyaan, caatatan, lapangan, dan rekaman tape recorder.³¹

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara wawancara

³⁰ Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi penelitian hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung. 1982, hal.

34.

³¹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992. hal. 9.

baik secara terstruktur, wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman kepada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berlangsung.

G. Analisa Data

Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan yang ada dan dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai masalah yang diteliti. Disamping itu, digunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti kembali dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³²

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 250.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

1. Letak Geografis

Desa Negeri Sakti berada di Kecamatan Gedong Tataan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Pesawaran. Kecamatan terbentuk berdasarkan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 1961 Tentang pengesahan Kecamatan Gedong Tataan. Adapun letak Kecamatan Gedong Tataan tersebut terdapat di Selatan Kabupaten Tanggamus. Luas wilayah Kecamatan Gedong Tataan lebih kurang 97 Km. yang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Way Lima
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tegineneng
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kedondong

Jarak Pusat Pemerintahan wilayah Kecamatan dengan desa yang terjauh adalah 5 Km dengan jarak tempuh kurang lebih 20 menit sedangkan Pusat Pemerintahan wilayah Kabupaten dengan Kecamatan berjarak 15 Km dengan jarak tempuh 30 menit. Kemudian jarak Kecamatan ini dengan Pusat kedudukan Kotamadya Bandar Lampung Ibukota Propinsi Lampung adalah 40 Km dengan jarak tempuh kurang lebih satu jam. Sedangkan

topografi Kecamatan Gedong Tataan ini datar sampai berombak 60% sementara berombak sampai berbukit 40% Kecamatan Gedong Tataan ini terdiri dari 19 Desa yaitu antara lain : Padang Ratu, Pampangan, Ci Padang, Way Layap, Bogorejo, Sukaraja, Gedong Tataan, Bagelen, Karang anyar, Kutoarjo, Negeri Sakti, sukabanjar, Kurungan nyawa, Bernung, Wiyono, Taman Sari, Kebagusan, Sungai Langka dan Sukadadi.

Adapun sebagai lokasi penelitian penulis adalah Desa Negeri Sakti, mempunyai luas wilayah sebesar 1.355 Km², dengan berbatasan wilayahnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukabanjar, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Way Layap, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bernung, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Langka.

2. Struktur Masyarakat Lampung

Daerah Lampung terletak disebelah ujung selatan pulau Sumatera. Lampung sendiri berasal dari kata “Lampong” yang artinya mengambang di air. Orang-orang Lampung berasal dari daerah segala berak pagaruyung yang terletak di daratan belalau, di kaki bukit pesagi sebelah selatan danau ranau, krui. Kemudian mereka menyebar dan merantau ke daerah ujung Pulau Sumatera yang sekarang yang dinamakan daerah Lampung. Dalam penyebaran mereka, orang-orang Lampung mendirikan wilayah-wilayah kediaman yang bersifat sementara yang dipimpin oleh kepala-kepala rakyat yang diberi gelar ratu. Perkembangan baru timbul setelah kesatuan-kesatuan tadi mengalami perpecahan dari dalam. Penyebaran penduduk

timbul lagi dan muncullah wilayah-wilayah baru yang dipimpin oleh para Umpu³³

Secara garis besar masyarakat adat Lampung dapat dibedakan kepada dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat Lampung beradat *Pepadun* yang disebut *Lampung Pepadun* dan masyarakat Lampung beradat *Saibatin* yang populer dengan sebutan *Lampung Pesisir*. Kedua kelompok masyarakat dimaksud pada dasarnya berkembang diatas landasan dasar budaya yang sama, seperti bahasa, tulisan, filsafat pandangan hidup, namun berbeda pada pengembangan praktek yang dipengaruhi oleh kebiasaan lokal yang melingkarinya.³⁴

3. Struktur Masyarakat Lampung Pepadun

Masyarakat Lampung beradat Pepadun ditandai dengan upacara adat pengambilan gelar kedudukan adat dengan upacara yang disebut *Pepadun*. Pepadun merupakan singgasana yang dipergunakan dalam setiap upacara pengambilan gelar adat. Oleh karena itu upacara ini disebut *Cakak Pepadun*. Kelompok masyarakat ini pada umumnya mendiami daratan wilayah Lampung yang jauh dari pantai laut seperti daerah Abung, Way Kanan, Sungkai, Tulaang Bawang dan Gunung Sugih.

Secara kekerabatan masyarakat ini terdiri dari empat clan besar yang masing-masing dibagi-bagi kedalam empat kelompok kerabat yang

³³ Soerjono Soekanto, *Garis-garis Besar Hukum Perkawinan Buay Suay Umpu, lampung Pepadun, Hukum Nasional*, 1969, hal 7.

³⁴ Departemen Agama IAIN Raden Intan Bandar Lampung, *Dialog Adat dan Agama dalam Praktek Sosial Masyarakat Adat Lampung*, 2006. hal 51

disebut *Buay*, dengan uraian dan rinciannya sebagai berikut:

1. Abung Siwo Megou, yang wilayahnya meliputi way abung, way rarem, way terusan, way pengubuan, dan way seputih. Terdiri dari Bua-buay nunyai, unyi, nuban subing, belituk, kunang, aji (toho), selagi dan nuwat. Kebudayaan nuwat masuk ikatan adat Abung siwo megou akan tetapi marga nuwat adalah kesatuan teritorial. Orang-orang Abung berpencar ditepi sungai dan way sekampung, lalu terpencar dan membangun marga-marga baru sampai di marga Labuan subbing (meringgat didekat tepi laut sebelah timur lampung).
2. Tulang Bawang Mego Pak
Meliputi wilayah tanah dari way Tulang Bawang Ilir
3. Way Kanan Buwai Lima (lima keturunan) dan Sungkai, meliputi wilayah tanah di daerah Way Kanan (Tulang Bawang Ulu, Way Umpu dan Way Besai) dan Way Sungkai, mencakup buay-buay semenjuk.
4. Pubian Telu Suku (Pubian Tiga Suku) meliputi wilayah di daerah Way Sekampung dan Way Sekaampung Ulu. Lazimnya dinamakan pula Pubian Telu Suku, oleh karena terdiri dari 3 kebudayaan, yaitu masyarakat Tambapupus dan Buku jadi.

Masyarakat Lampung Pepadun terdiri dari buay yang mendiami suatu wilayah yang dinamakan marga. Marga-marga ini terdiri dari beberapa tiyuh/desa/kampung yang merupakan bagian dari buay. Sebuah tiyuh didiami beberapa suku dimana suku-suku ini mencakup beberapa keluarga besar yang terbentuk dalam beberapa nuwou (rumah).

Kesatuan masyarakat adat terikat adat istiadat pada suatu rumah asal (nuwou tohow), pada suatu rumah kerabat, rumah asal (nowou balak) yang dibawah pimpinan anak penimbang selaku penimbang nowou.

Kepala adat yang merupakan kepala dari masyarakat hukum adat, dinamakan penimbang yang mempunyai dua pengertian. Yakni pertama artinya “*pengganti*” untuk menunjukkan pada kepenimbang sebagai suatu kedudukan dan kedua berarti sebagai “*yang menimbang*” untuk menunjukkan pada kepenyimbangan sebagai suatu peranan. Kepenyimbangan seseorang diwariskan kepada Putera Sulung yang mempunyai hak tunggal untuk menjadi penimbang, sebagai pengganti ayahnya.

Attribut yang pokok dari seseorang penimbang adalah Pepadun yang berarti tempat kedudukan seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban yang istimewa/khusus. Pepadun merupakan tempat duduk yang diberi ukir-ukiran dan mempunyai sandaran yang tinggi yang disebut sesako. Rapat antara para penimbang yang merupakan majelis tertinggi dari masyarakat hukum adat setempat dinamakan Proatin. Ketua Proatin biasanya adalah penimbang yang tertua. Akibat dari adanya lembaga Pepadun, terdapat 2 macam penimbang, yakni :³⁵

- 1) Penimbang Pangkat, yakni penimbang yang telah membentuk pepadun beserta keturunannya (hanya pria). Apabila penimbang

³⁵ Soerjono Soekanto, *Garis-garis Besar Hukum Perkawinan Buay Suay Umpu, lampung Pepadun, Hukum Nasional*, 1969, hal 15.

tersebut mengepalai sebuah marga, namanya adalah penimbangan marga, lalu seterusnya ada kepala tiyuh kepala suku.

- 2) Penimbang adat yang merupakan keturunan daripada para pendiri marga, tiyuh dan suku.

Perbedaan tersebut, kini tidak ada lagi, oleh karena pada dewasa ini dikenal adanya lima macam penimbang, yaitu :

1. Penimbang Marga
2. Penimbang Tiyuh
3. Penimbang Suku
4. Penimbang Adat
5. Penimbang Tuho

Hanya penimbang marga yang berhak untuk meresmikan penimbang-penimbang lain di dalam kedudukannya. Penimbang yang berhak atasnya akan tetapi oleh karena kesulitan-kesulitan ekonomi, dia tidak dapat mempertahankan kedudukan sosialnya (disebut “ *penimbang jemanten*” yang artinya penimbang yang dipensiunkan).

4. Tata Cara Upacara Perkawinan Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Tata cara perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun pada umumnya berbentuk perkawinan dengan cara lamaran (*rasan tuha*) dengan memakai jujur, yang ditandai dengan pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan. Uang tersebut digunakan untuk menyiapkan

alat-alat kebutuhan rumah tangga (*sesan*), dan diserahkan kepada mempelai laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung. Penyerahan *sesan* secara formal (*secara adat*) merupakan bentuk penyerahan keluarga mempelai wanita kepada keluarga mempelai laki-laki dan secara hukum adat penyerahan *sesan* ini menandakan terpisahnya hubungan keluarga antara mempelai wanita dengan orang tuanya. Upacara perkawinan yang dilakukan secara adat, menurut masyarakat adat Lampung pepadun terdiri dari perkawinan yang melalui proses lamaran (*rasan tuha*) dan perkawinan *sambangan* (tanpa acara lamaran).

Adapun perkawinan yang melalui proses lamaran (*rasan tuha*) yaitu :³⁶

Hibal Serba (proses lamaran dilakukan dengan perundingan antar kampung, dengan uang jujur yang bernilai 24), *Bumbang aji* (lamaran dilakukan dengan cara mempelai pria menjemput mempelai wanita tidak berpakaian adat lengkap, hanya memakai pakaian haji), *Intar padang* (proses lamaran dilakukan oleh pemuka adat terdekat yang berlangsung di rumah mempelai wanita, tidak di balai adat), *intar manom* (wanita di ambil diam-diam dari rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan siapapun di malam hari).

Adapun perkawinan *sebambangan* (perkawinan tanpa acara lamaran), sebelum si pria dan si wanita telah mengatur rencana agar si wanita yang akan dinikahnya dapat meninggalkan rumah secara diam-

³⁶ Depdikbud, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, Bandar Lampung, 1996. hal 189

diam dan meninggalkan surat permintaan maaf beserta uang peninggalan. Awalnya perkawinan *sebambangan* merupakan (*rasan sanak*) namun penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada orang tua.³⁷

a. Pelaksanaan perkawinan *Ngakuk* (perkawinan jujur) melalui lamaran

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Mauni gelar Ratu Suttan junjungan suttan selaku salah satu tokoh adat Lampung Pubian Desa Negeri Sakti bahwa bentuk perkawinan *Ngakuk* (bentuk perkawinan jujur) dan perkawinan semando yang dilaksanakan secara terang, dalam arti dilakukan secara terang-terangan dengan jalan peminangan adalah melalui pelaksanaan, lamaran oleh pihak pria kepada pihak wanita yang akan melangsungkan pernikahan untuk perkawinan dalam bentuk jujur.

Pelaksanaan lamaran atau peminangan didahului oleh adanya kesepakatan antara dua orang muda – mudi (*muli-mekhanai*) yang telah mengikat janji untuk melangsungkan pernikahan dan memberitahukan kepada orang tuanya baik secara langsung maupun melalui perantara saudaranya atau pihak lain. Adanya keinginan tersebut selanjutnya ditanggapi oleh kedua pihak masing-masing. Sebagai tindak lanjut dari keinginan muda mudi tersebut, perwakilan dari kerabat si pria berikut utusan ketua ada (*penyumbing*) yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dewasa, dan disertai oleh calon suami (boleh ikut dan boleh

³⁷ Ibid, hal 191

tidak) akan datang ke rumah si wanita menurut waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Demikian halnya bagi si wanita, baik langsung maupun melalui perantara, memberitahukan kepada orang tuanya, bahwa si pria yang selama ini telah menjalin hubungan dengannya, berniat ingin melakukan lamaran terhadap dirinya. Dengan demikian akan mengumpulkan kerabat-kerabatnya setempat untuk menyambut kedatangan pihak pria yang melakukan peminangan terhadap wanita yang akan dinikahinya.

Adapun syarat-syarat pelamaran tersebut, pihak pria yang akan melamar harus menyerahkan benda atau barang-barang kepada pihak wanita, antara lain: ³⁸

- a) *Sirih pinang* sebagaimana simbol atau suguhan dalam peminangan.
- b) *Kue-kue* dan *makanan* yang terbuat dari ketan (dodol dan wajik) sebanyak 12/24 rangkap yang diletakkan ke dalam lima buah nampan yang telah dibungkus dan dikemas dalam kain/sapu tangan adat (*simpok tangan*).
- c) *Rokok tembakau* secukupnya yang ditempatkan pada wadah yang sama dengan sirih pinang.

³⁸ Wawancara dengan Usman Yusuf gelar Suttan Junjungan Suttan, Tokoh Adat, Tanggal 19 Desember 2007

- d) *Uang* sejumlah yang ditentukan dalam sidang atau perjanjian kedua belah pihak mengenai jumlah uang jujur yang diminta pihak wanita (*jojokh*) berikut uang adat yang ditempatkan dalam sidang.
- e) *Pakaian*, seperangkat secara lengkap, berupa kain sarung, baju kebaya, sandal kerudung dan lain-lain berikut sehelai kain kebaya sebagai tanda bahwa yang di pinang masih gadis.
- f) *Barang-barang* yang dijanjikan oleh kedua pihak yakni yang akan menikah secara pribadi seperti : cincin kawin atau benda-benda lain yang termasuk dalam maskawin.

Apabila masing-masing pihak saling menerima maka, Pelamaran tersebut memperoleh kesepakatan, dan hari yang ditentukan oleh kedua pihak, si pria dan kerabat-kerabatnya mengadakan acara penjemputan (*nyungsung pengantin*) yakni pengantin wanita akan dibawa ke kediaman calon pengantin pria untuk melangsungkan pernikahan di kediaman pengantin pria.

Setelah si wanita dibawa atau dijemput ke kediaman calon suaminya, maka berdasarkan hari yang ditetapkan akan dilangsungkan pernikahan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan petunjuk dan tata cara dalam agama islam, yang dihadiri oleh seluruh kerabat serta jiran tetangga, baik dari pihak suami maupun pihak istri.

Demikian pula halnya dengan perkawinan yang dilaksanakan dalam bentuk semando, tata cara dan persyaratan dalam pelamaran (*peminangan*) sama halnya dengan yang ditetapkan dalam perkawinan

jujur akan tetapi dalam pelaksanaan perkawinan semando, yang melaksanakan peminangan adalah pihak wanita dan kerabatnya terhadap kerabat pihak pria yang akan dijadikan suaminya. Begitu pula pelaksanaan penjemputan (*nyungsung pengantin*) serta pelaksanaan resepsi pernikahan adalah sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak kerabat wanita ditempat kediaman pihak kerabat wanita tersebut.

- b. Perkawinan *Ngakuk* (jujur) dan Semando melalui sebambangan (gelap)
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mauni gelar Ratu Suttan junjungan suttan (tokoh adat di Desa Negeri Sakti), bahwa walaupun sangat jarang terjadi dan dianggap suatu hal yang kurang baik bagi masyarakat adat Lampung Pepadun, namun karena adanya sebab-sebab tertentu atau karena suatu hal, maka dalam melangsungkan perkawinan, muda-mudi dapat saja melakukan kawin gelap atau *sebambangan* (*larian*). Pengertian kawin gelap (tidak dilaksanakan secara terang – terangan melalui proses lamaran) ada dua macam:
 - a. Gelap terhadap orang tua dan keluarganya sendiri, maksudnya seorang pria dan seorang wanita melakukan *sebambangan* (kawin lari) tanpa sepengetahuan orang tua dan kerabatnya masing-masing.
 - b. Gelap terhadap penyimbang, dalam perkawinan tersebut dilaksanakan melalui pihak kerabatnya masing-masing, akan tetapi pelaksanaan perkawinan hanya dilakukan secara diam-diam

(menikah di KUA) tanpa melibatkan penyimbang adat sebagai pemantau dan menyatakan sahnya perkawinan secara adat.

Pelaksanaan perkawinan melalui *sebambangan* secara gelap tersebut bisa dilakukan dalam bentuk perkawinan jujur atau pada perkawinan dalam bentuk semando. Adapun hal-hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan *sebambangan* tersebut antara lain disebabkan oleh faktor – faktor sebagai berikut:

- a. Keinginan dari bujang atau gadis (*muli-mekhanai*) sebagai pengantin bertolak belakang dengan keinginan orang tua dan keluarga kerabatnya.
- b. Timbulnya saling tarik menarik yang sulit dijalani tentang syarat-syarat perkawinan, termasuk status perkawinan apakah *Ngakuk* (jujur) atau semando.
- c. Adanya faktor – faktor kemampuan biaya, yakni pihak pria tidak mampu memenuhi persyaratan biaya-biaya yang diajukan oleh pihak keluarga wanita.
- d. Untuk mempercepat jalannya proses perkawinan.
- e. Karena kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan terikat akan waktu atau masa, misalnya terjadi kehamilan sebelum menikah.

Pelaksanaan *sebambangan* (larian) dalam bentuk perkawinan *Ngakuk* (jujur dilakukan setelah adanya kesepakatan antara si wanita dengan si pria yang akan *sebambangan*, serta adanya persetujuan dari

kedua orang tua dan tua – tua adat / penyimbang dari pihak pria menyangkut adanya rencana *sebambangan* yang akan dilakukan oleh

pria terhadap wanita yang dinikahinya.³⁹

Setelah tibanya waktu perjanjian antara si pria dan si wanita mereka melaksanakan *sebambangan*, maka pria akan membawa lari si wanita dari kediaman orang tuanya menuju kediaman atau membawa ke rumah adat (*ke rumah penyimbang*) terlebih dahulu. Tujuan dibawanya si wanita ke rumah penyimbang adalah untuk menyelamatkan atau meminta perlindungan kepada tua adat (*penyimbang*) terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila si wanita dilarikan oleh si pria yang akan menikahnya telah masuk ke rumah adat, maka si wanita tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh pihak manapun juga (sudah menjadi tanggung jawab tua adat / *punyimbang*). Lamanya si calon mempelai wanita di rumah adat tersebut tergantung kepada situasi dan kondisi setempat. Si wanita yang dilarikan telah dibawa ke rumah adat tidak langsung dibawa ke rumah si pria (calon suaminya) sebelum diadakan *cuak mengan* (makan bersama) terlebih dahulu di rumah adat tersebut, dan si wanita akan bermalam minimal satu hari di rumah adat (*rumah punyimbang*). Hal tersebut sebagai tanda bahwa kedua belah pihak telah menundukkan dirinya kepada hukum adat yang berlaku.

³⁹ Wawancara dengan Usman Yusuf gelar Suttan Junjungan Suttan, Tokoh Adat, Tanggal 19 Desember 2007

Lebih lanjut dijelaskan bahwa syarat-syarat *ngebambang* (melarikan) seorang wanita yang akan dinikahi oleh si pria lain adalah:

- a. Wanita harus dilarikan dari rumah atau kediaman orang tuanya, dan sebelum wanita dilarikan, terlebih dahulu harus meninggalkan surat atau pernyataan *sebambangan* serta alamat yang dituju jelas.
- b. Meninggalkan sejumlah uang (*pengepik*) yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak yang akan *sebambangan*.
- c. Pihak yang *ngebambang* (pihak yang melarikan) harus mengirimkan utusan atas perintah punyimbang kepada tua – tua adat di pihak si wanita di samping adanya surat peninggalan, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atas kepergian si wanita kepada punyimbang / tua – tua adat di pihak si wanita.
- d. Utusan yang diperintah tersebut (*ngejuk pandai*) harus menyerahkan suatu bingkisan berupa sebilah senjata yang menyatakan bahwa ia sudah menyerah dan sebagai syarat perdamaian.
- e. Bilamana saat dilarikan si wanita ditemani oleh kerabatnya (*punakawan*), maka kawannya tadi akan diantarkan kembali ke tempat semula dan akan diberikan seperangkat pakaian beserta uang sebagai tanda terima kasih dan permohonan maaf.
- f. Setelah menerima berita dari utusan tersebut selanjutnya pihak kerabat si wanita akan mengirim utusan menuju kediaman si pria

untuk meyakinkan berita dan kabar yang diterima dari utusan pihak pria.

Demikian pula halnya dengan perkawinan dalam bentuk semando gelap, persyaratan dalam proses perkawinan adalah sama seperti yang ditetapkan dalam syarat-syarat *sebambangan*, akan tetapi dalam perkawinan semando gelap, yang berperan untuk melakukan perundingan untuk melangsungkan perkawinan dalam bentuk semando gelap adalah berada di pihak si wanita.

Lebih lanjut dijelaskan tata cara perkawinan dalam bentuk semando gelap diawali dengan adanya kesepakatan antara *muli-mekhanai* (bujang-gadis) bahwa akan melakukan perkawinan dalam bentuk semando gelap. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut maka orang dan kerabat wanita serta punyimbang dari pihak wanita akan mengutus seseorang atau dia orang *mekhanai* (bujang) yang cukup mengenali si pria (calon pengantin pria) untuk menjemput calon pria tersebut secara diam-diam.

Sebelum si pria dibawa ke tempat calon pengantin wanita, maka terlebih dahulu akan dibawa ke rumah adat (*rumah penyumbang*) yang ada di tempat wanita sebagai tanda pemberitahuan kepada punyimbang. Dari rumah punyimbang tersebut barulah si calon pengantin pria akan dibawa dan diiring oleh orang tertentu (*jakhu suku*) ke rumah calon mempelai wanita, dan pada saat itu juga

dilaksanakan *akad nikah* secara islam terhadap kedua calon mempelai, yang persiapannya telah dilaksanakan sejak semula.

Setelah upacara pernikahan selesai dilaksanakan, selanjutnya punyimbang akan mengutus kembali orang-orang tertentu dari pihak mempelai wanita yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dewasa ke tempat asal pria untuk melaporkan hal-hal yang telah terjadi (dilaksanakannya pernikahan) antara si pria dengan si wanita yang melakukan pernikahan semando secara gelap.

B. Pelaksanaan Pengangkongan (Pengangkatan Anak) Dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Usman Yusuf gelar Suttan Junjungan Suttan, *ngangkon* (pengangkatan) dilakukan dengan alasan⁴⁰:

1. Tidak mempunyai anak atau keturunan sama sekali
2. Tidak mempunyai anak laki-laki
3. *Ngangkon* karena perkawinan

Lebih lanjut beliau menguraikan arti dari pada *ngangkon* itu sendiri, *ngangkon* (pengangkatan) harus dilakukan apabila orang Lampung Pepadun ingin menikah dengan orang yang berlainan suku atau berbeda buay (keturunan),namun masyarakat adat Lampung Pepadun Pubian Desa Negeri

⁴⁰ Wawancara dengan Usman Yusuf gelar Suttan Junjungan Suttan, Tokoh Adat, Tanggal 19 Desember 2007

Sakti memiliki ketentuan tersendiri yaitu, seseorang harus melakukan *ngangkon* diperuntukkan hanya pada orang yang berlainan suku dan untuk mereka yang menikah dengan orang Lampung yang tidak satu buay tidak diharuskan melakukan upacara *ngangkon*.

Pengertian *ngangkon* yang diangkat oleh penulis dalam penelitian adalah *ngangkon* dalam konteks perkawinan yang merupakan upacara pengangkatan terhadap orang yang berlainan suku dan berbeda buay, yang akan menikah dengan orang Lampung pepadun. Dalam proses pelaksanaan perkawinan seorang yang berasal dari luar suku atau buay lain dicarikan dan diserahkan kepada Bapak angkat yang merupakan kerabat dekat orang Lampung pepadun tersebut.

Adapun pada zaman dahulu upacara *ngangkon* dilakukan sebagai syarat untuk menjadi bagian dalam anggota kerabat (*saudara*) yang dilakukan atas dasar hubungan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya pengangkatan para tenaga kerja yang berasal dari luar daerah Lampung untuk dijadikan saudara angkat, anak angkat (anak asuh) agar dapat tinggal di rumah mereka.

Masyarakat adat Lampung pepadun memiliki suatu aturan berdasarkan peraturan adat yang berlaku bahwa barang siapa berada di lingkungan rumah dan bukan bagian dari kerabat merupakan suatu pelanggaran adat dan akan dikenakan sanksi, sehingga untuk mereka yang bukan anggota kerabat agar dapat bebas keluar masuk dalam rumah masyarakat adat Lampung pepadun tersebut maka perlu dilakukan *ngangkon*, agar keberadaan mereka diakui sebagai bagian dari kerabat masyarakat adat Lampung Pepadun.

Ngangkon pada zaman dahulu dalam konteks perkawinan jarang dilakukan, bukan dianggap tabu, karena masyarakat adat Lampung Pepadun jarang melakukan perkawinan dengan orang yang berlainan suku dan mereka menganggap perkawinan antar masyarakat adat Lampung Pepadun adalah perkawinan yang sempurna. *Ngangkon* pada jaman dahulu dilakukan atas dasar hubungan kerja atau hubungan baik atau persahabatan dan bukan karena perkawinan semata, walaupun *ngangkon* dilakukan atas dasar perkawinan tetap memiliki latar belakang pekerjaan.

Adapun *ngangkon* dalam konteks perkawinan yang berkembang saat ini lebih didasarkan pada kebutuhan perkawinan, maksudnya tidak seperti *ngangkon* yang ada pada waktu sebelumnya (zaman dahulu), yaitu pengangkatan atau *ngangkon* dalam perkawinan dilakukan atas dasar hubungan kerja. *Ngangkon* dalam perkawinan yang berkembang saat ini lebih didasarkan pada keinginan orang Lampung itu sendiri untuk lebih mempertahankan adat istiadatnya, bukan berarti *ngangkon* dalam perkawinan pada zaman dahulu tidak mempertahankan adanya adat istiadat Lampung, tetapi masyarakat adat memposisikan *ngangkon* dalam perkawinan bukan sebagai suatu kebutuhan yang pokok, sedangkan masyarakat adat saat ini menganggap *ngangkon* dalam perkawinan yang merupakan hal yang pokok. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keharusan melakukan *ngangkon* apabila masyarakat adat Lampung pepadun akan menikah dengan orang yang berlainan suku. Adapun maksud dan tujuan (punyimbang) / ketua adat mengharuskan mereka untuk melakukan *ngangkon* adalah agar adat istiadat

masyarakat adat Lampung Pepadun tetap dipertahankan dan tali kekerabatan tidak terputus.

Perkawinan campuran ini semakin banyak jumlahnya karena majunya perkembangan zaman dan pergaulan tidak dalam satu daerah saja sehingga mengenal orang dari luar daerah lebih banyak intensitasnya. Selain itu pelaku *ngangkon* cenderung tidak mau menerima sistem perjodohan dan mereka cenderung memilih pasangan hidup atas dasar pilihan mereka sendiri. Bila tidak melakukan *ngangkon* maka orang yang berlainan suku yang menikah dengan anak mereka tidak diakui dalam adat dan tali kekerabatan terputus.

Secara langsung pandangan tabu punyimbang terhadap *ngangkon* sudah mulai berkurang bahkan sampai sekarang *ngangkon* sudah menjadi familiar (biasa dilakukan) di lingkungan masyarakat adat Lampung Pepadun dan intensitas pelaksanaannya lebih besar dilakukan dibandingkan masyarakat dengan *ngangkon* dalam perkawinan yang dilakukan pada zaman dahulu (zaman kolonial).

1. Pelaksanaan *ngangkon*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan dan responden (para punyimbang adat dan pelaku *ngangkon*), maka diperoleh jawaban mengenai pelaksanaan *ngangkon*, yaitu sebagai berikut:

a. Jawaban punyimbang adat (tokoh adat)

Ngangkon dalam perkawinan merupakan suatu kegiatan pengangkatan yang harus dilakukan apabila orang Lampung akan menikah dengan orang yang berlainan suku, kegiatan *ngangkon* ini dilakukan atas dasar

ada permintaan dari orang yang diangken, karena ingin menikah dengan salah satu bagian anggota keluarga suku Lampung. *Ngangkon* merupakan suatu usaha untuk mempertahankan adat istiadat dan kebudayaan daerah Lampung agar tetap eksis (ada) di era globalisasi saat ini dan kebudayaan Lampung pepadun Pubian khususnya terhadap perkembangan zaman saat ini, tanpa merubah nilai dan isi budaya itu sendiri.

Keberadaan lingkungan keluarga mendukung pelestarian kebudayaan Lampung pepadun, ditandai dengan peran orang tua yang mengharuskan anak-anak mereka melakukan upacara *ngangkon* apabila akan menikah dengan orang yang berlainan suku untuk mempertahankan tali kekerabatan yang telah dimiliki atau diwariskan, sehingga *ngangkon* menjadi adat, walaupun anak mereka tidak menikah dengan orang Lampung, dengan melaksanakan *ngangkon* maka status perkawinan yang dilakukan akan diakui keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat adat Lampung dan tali kekerabatan tetap terjalin (tidak terputus) walaupun menikah dengan orang yang berlainan suku.

b. Jawaban Pelaku *Ngangkon*

Ngangkon merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan agar perkawinan dengan orang yang berlainan suku sah secara adat dan agama, selain itu keberadaan atas diri mereka diakui dalam masyarakat adat Lampung dan secara langsung mempertahankan serta meneruskan tali kekerabatan yang telah dimiliki oleh orang tuanya.

2. Tata Cara Pelaksanaan Upacara *Ngangkon*

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa alasan utama suatu keluarga melakukan upacara *ngangkon* sebelum melaksanakan upacara perkawinan

secara adat adalah jika salah satu anggota keluarga akan menikah dengan orang yang belainan suku.

Upacara *ngangkon* dalam perkawinan biasanya dilakukan dengan beberapa acara atau rutinitas sebagai syarat sahnya *ngangkon* dan diakui masyarakat adat setempat.⁴¹

Menurut Drs. Nawawi SP (kepala keluarga yang mengangkon) bahwa sesuai dengan realita yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Negeri Sakti sebagai berikut:

Apabila seseorang ingin menikah dengan orang yang belainan suku, kemudian diangkat oleh orang Lampung yang telah ditunjuk atau dipilih sebagai bapak angkat yang didasarkan atas beberapa pertimbangan:

- a. Kedudukan menantu setelah melakukan *ngangkon* dapat diakui dalam adat dan sah menjadi warga adat Lampung, sehingga orang Lampung yang menikah dengan orang yang belainan suku tidak hilang statusnya dalam adat sebagai warga adat Lampung.
- b. Upacara *ngangkon* dilakukan sebelum upacara perkawinan secara adat, kegiatan ini merupakan suatu rangkaian yang dilakukan apabila menikah dengan orang yang belainan suku agar mendapat pengakuan secara sah oleh Majelis perwatin dan masyarakat adat.

⁴¹ Wawancara dengan Drs. Nawawi SP, Keluarga yang mengangkon, Tanggal 19 Maret 2008

Adapun prosesi dari pelaksanaan upacara *ngangkon* dalam perkawinan ini adalah sebagai berikut:⁴²

a. Pemandai Kampung (memberitahukan kepada tokoh adat)

Upacara *ngangkon* diawali dengan orang yang bersangkutan datang kepada rukun tetangga untuk memberitahukan tentang perihal *ngangkon* dan dipilih orang tua angkat, setelah keluarga yang akan *mengangkon* mengetahui latar belakang yang akan diangken, maka keluarga yang akan *mengangkon* tersebut memberitahukan kepada majelis perwatin, sekretaris adat dan lid adat (anggota adat) atas maksud dan tujuan untuk *mengangkon* dan meminta kepada sekretaris adat agar dibuatkan konsep *pengangkonan* atas keputusan pewatin (hadirin) dan ingin *mengangkon* mengumpulkan tokoh-tokoh adat yang berkepentingan.

b. Sidang Adat Perwatin

Setelah pemberitahuan dilakukan oleh orang yang akan *mengangkon* kepada majelis perwatin dan masyarakat adat, mereka dikumpulkan dla rapat perwatin di ruang yang telah ditentukan oleh orang yang akan *mengangkon* atau dapat juga dilakukan rumah orang yang bersangkutan atau dibalai musyawarah. Acara ini pada umumnya dapat dihadiri oleh seluruh masyarakat adat dan majelis perwatin yang ada di tempat tersebut, atau dapat juga dihadiri oleh orang yang berkepentingan saja seperti punyimbang adat dan lid adat (anggota adat).

⁴² Sayuti Ibrahim, *Buku Handak II Mengenal Adat Lampung*, Gunung Pesagi, Bandar Lampung, . hal 87

Jalannya rapat dalam *pengangkongan* ini di mulai dengan tuan rumah menunjuk salah seorang dari tokoh adat untuk menjadi juru bicara atas perihal tersebut. Selanjutnya juru bicara dari tuan rumah bertanya kepada majelis perwatin, kepada siapa lawan bicaranya (biasanya sudah ada yang ditunjuk untuk mewakili) dan dilanjutkan dengan pertanyaan dari juru bicara tuan rumah atas kedatangan mereka kepada majelis perwatin serta menanyakan apakah perwatin setuju dengan maksud tersebut. Selanjutnya perwatin meminta kepada sekretaris adat untuk mendapatkan konsep keputusan perwatin, jika ada perubahan diperbaiki saat itu juga dan jika tidak ada maka dilanjutkan dengan penandatanganan surat keputusan perwatin tersebut dan dianggap selesai oleh majelis perwatin.

c. Penurunan Uno / Daw adat (dana anggaran wajib adat)

Selanjutnya setelah pengesahan surat keputusan perwatin dan telah dianggap resmi oleh majelis perwatin maka acara selanjutnya adalah dilakukan penurunan Draw adat yang merupakan syarat sah dalam pelaksanaan *pengangkongan* yang harus dipenuhi serta dijalankan oleh keluarga yang hendak melakukan *pengangkongan*.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam *ngangkong* adalah penurunan Daw adat yang biasanya diberikan atau diserahkan secara simbolis kepada majelis perwatin dari orang yang melakukan *ngangkong*, dan syarat-syarat atas daw adat tersebut biasanya telah disusun oleh para perwatin adat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mauni gelar Ratu Suttan junjungan suttan (tokoh adat), bahwa besarnya Daw adat (uang

adat) yang harus dipenuhi oleh pelaku *ngangkon* berupa kelipatan yang dimulai dari nilai yang tertinggi yaitu 24 kemudian 12 dan 6 tergantung kesepakatan dan kemampuan si pelaku *ngangkon*. Persyaratan ini disiapkan sebelum upacara *ngangkon* dilaksanakan, setelah persyaratan terpenuhi. Kemudian daw adat (uang adat) tersebut dibagikan kepada majelis perwatin (seluruh punyimbang dan tamu yang hadir) dalam upacara *ngangkon* tersebut. Tujuan diberikan daw adat ini adalah agar semua perwatin yang ada mengakui akan keberadaan orang yang melakukan *ngangkon*.

Dengan diterimanya syarat-syarat tersebut oleh majelis perwatin maka secara otomatis orang yang berasal dari luar suku Lampung tersebut telah sah menjadi warga adat Lampung Pepadun.

3. Pengaruh *Ngangkon* Dalam Perwakilan⁴³

Keberadaan lingkungan keluarga mendukung pelestarian kebudayaan Lampung pepadun, ditandai dengan peran orang tua yang mengharuskan anak-anak mereka melakukan upacara *ngangkon* apabila akan menikah dengan orang yang berlainan suku untuk mempertahankan tali kekerabatan.

Maksud *ngangkon* dalam perkawinan adalah :

1. Agar anak yang menikah dengan orang yang berlainan suku, diakui keberadaannya atas perkawinan yang dilakukan dalam masyarakat adat.

⁴³ Wawancara dengan Drs. Nawawi SP, Keluarga yang mengangkon, Tanggal 19 Maret 2008

2. Sebagai usaha punyimbang adat agar orang yang dari luar suku Lampung dapat mengerti tentang adat istiadat Lampung pepadun sepenuhnya.
3. Merupakan tanggung jawab, selaku masyarakat adat untuk melaksanakan dan melestarikan kebudayaan Lampung pepadun.
4. Agar perkawinan sah secara adat (seperti mendapat gelar secara adat Lampung, dapat memakai pakaian ada, lampung dan lain-lain).
5. Agar pelaku *ngangkon* dan generasi penerusnya mempunyai hak adat seutuhnya.

Akibat yang ditimbulkan jika tidak melakukan *ngangkon* :

1. Seseorang yang menikah dengan orang yang berlainan suku jika tidak melakukan upacara *ngangkon*, maka perkawinan yang dilakukan tidak sah secara adat, meskipun sah secara agama islam.
2. Orang Lampung yang menikah dengan orang yang berlainan suku, jika tidak melakukan *ngangkon*, maka tidak diakui akan keberadaan mereka dalam masyarakat adat, tidak dapat ikut serta dalam kegiatan adat dan tidak memiliki hak dalam adat.
3. Orang Lampung yang menikah dengan orang yang berlainan suku, jika tidak melakukan *ngangkon*, ia akan dianggap oleh masyarakat adat belum menikah, karena belum ada pengakuan dari masyarakat adat.

Upacara pengangknan dalam pandangan masyarakat adat Lampung Pepadun Pubian, mencerminkan pandangan masyarakat adat Lampung Pepadun Pubian saat ini, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti

dengan Bapak Mauni gelar ratu Suttan junjungan suttan (tokoh adat) bahwa *ngangkon* menurut masyarakat adat Lampung Pepadun Pubian yang berada di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran memiliki ketentuan tersendiri, yaitu apabila orang Lampung yang akan menikah dengan orang yang berlainan suku, maka ia wajib melakukan *upacara ngangkon* terlebih dahulu sebelum upacara perkawinan secara adat dilakukan.

Upacara pengangkonan menurut masyarakat adat Lampung Pepadun Pubian dapat dilihat bahwa upacara *ngangkon* merupakan suatu usaha yang dilakukan sebagai proses masuknya orang yang berlainan suku menjadi bagian dari anggota kerabat yang bertali adat, dan dianggap masyarakat sama kedudukannya dengan masyarakat adat Lampung seluruhnya.

Pandangan Punyimbang terhadap pengangkonan pada zaman dahulu dan saat ini dilihat dari faktor-faktor yang menyebabkan punyimbang menganggap tabu dan tidak tahu terhadap upacara *ngangkon*. Berdasarkan deskripsi data mengenai pandangan *ngangkon* dalam perkawinan menurut punyimbang pada zaman dahulu adalah suatu hal yang tabu untuk dilakukan, hal ini disebabkan karena punyimbang memiliki suatu pandangan Lampung Pepadun adalah perkawinan yang dilakukan antara masyarakat adat Lampung dalam satu dan atau satu pepadun dan perkawinan dengan orang yang berlainan suku sangat jarang dilakukan, karena dianggap tidak baik. Kalaupun perkawinan dengan orang yang

berasal dari luar suku yang dilakukan pada zaman dahulu hanya berdasarkan hubungan kerja atau hubungan baik dan bukan atas dasar perkawinan semata, dengan kata lain bahwa pengangkongan dalam perkawinan dilakukan lebih utama didasarkan oleh kebutuhan ekonomi.

Anggapan upacara pengangkongan dianggap tabu oleh punyimbang jika tidak dilihat dari faktor-faktor penyebab adalah adanya anggapan bahwa pendapat punyimbang adalah yang paling benar dan merupakan usaha untuk mengisolasi diri agar kebudayaan Lampung tidak dipengaruhi oleh kebudayaan lain. Adapun pandangan punyimbang saat ini terhadap upacara *ngangkon* yang tidak lagi menganggap upacara *ngangkon* sebagai satu hal yang tabu untuk dilakukan. Jika dilihat dari faktor-faktor penyebab punyimbang tidak menganggap tabu terhadap upacara *ngangkon* tersebut adalah karena adanya perubahan pola pikir dari punyimbang bahwa *ngangkon* dapat dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan adat istiadat dan tidak lagi menganggap pendapatnya yang terbaik melainkan kebudayaan lama harus mengikuti perkembangan zaman tanpa merubah esensi (isi) dari kebudayaan itu sendiri.

Punyimbang pada zaman dahulu memandang tabu terhadap upacara *ngangkon* dalam perkawinan lebih didasarkan pada pola fikir yang menganggap adanya perkawinan yang baik dan tidak baik untuk dilakukan, sehingga dari pandangan punyimbang tersebut dijadikan suatu doghma (acuan) oleh masyarakat Lampung Pepudan pada zaman dahulu. Oleh karena itu intensitas *ngangkon* dalam perkawinan sangat kurang,

kalaupun dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan ekonomi. Berbeda dengan pandangan punyimbang saat ini terhadap upacara *ngangkon* yang dilakukan oleh masyarakat Lampung Pepudan apabila menikah dengan orang yang berlainan suku, punyimbang dalam perkawinan. Diikuti dengan perubahan dasar untuk melakukan *ngangkon* mengalami suatu perubahan yaitu *ngangkon* dilakukan atas dasar yang harus dilakukan untuk mempertahankan tali kekerabatan agar tidak terputus dan tetap melestarikan kebudayaan asli di era globalisasi seperti saat ini.

Upacara *ngangkon* pada zaman dahulu dan saat ini pada dasarnya memiliki suatu artian sebagai usaha untuk melindungi dan meneruskan kebudayaan Lampung agar tetap terjaga keasliannya dan tetap eksis mengikuti perkembangan zaman yang ada, kalaupun ada anggapan yang berbeda, itu hanya berdasarkan oleh pandangan punyimbang yang terlalu over protective (terlalu menjaga) terhadap kebudayaan Lampung pada zaman dahulu. Namun perbedaan tersebut tidak menjadikan mengalami suatu kemajuan atas dasar perbedaan pandangan tersebut, yang pada akhirnya mengarahkan pada suatu perbaikan.

Latar belakang pengangkongan dan pengaruh upacara pengangkongan terhadap perkawinan, dimana pada wawancara ini dipaparkan tentang latar belakang pengangkongan yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun Pubian saat ini, Antara lain, adalah sebagai suatu usaha mempertahankan adat istiadat dan tali kekerabatan orang tua yang memiliki agar tidak terputus walaupun anak mereka menikah dengan

orang yang berlainan suku, dan pengaruh yang ditimbulkan dari pelaksanaan upacara pengangkongan terhadap perkawinan, adalah adanya pengakuan dari masyarakat adat tentang keberadaan orang yang *ngangkon* dan perkawinan yang dilakukan sah secara adat.⁴⁴

Semakin banyaknya jumlah perkawinan antar suku dewasa ini, dikarenakan pada kalangan anggota keluarga masyarakat adat yang telah maju menjadikan orang tua atau keluarga, dikalahkan oleh anak-anak mereka yang tidak mau lagi terikat oleh kehendak orang tua atau keluarga, juga tidak lagi membedakan asal – usul adat seseorang untuk melakukan perkawinan, walaupun masih ada keinginan golongan tua untuk tetap menghilangkan sistem perkawinan antara suku. Karena secara teoritis sistem keturunan pada masyarakat Lampung Pepadun menganut sistem patrilineal, yang menarik garis keturunan dari bapak, sehingga kedudukan para pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan wanita di dalam keluarga, dan usaha agar sistem perkawinan pada masyarakat Lampung Pepadun masih tetap terjaga walaupun anak mereka menikah dengan orang yang berlainan suku. Maka usaha yang dilakukan untuk meneruskan keturunan tersebut adalah dengan cara melakukan upacara *ngangkon* sebelum upacara perkawinan dilakukan.

Walaupun perkawinan ini cenderung tidak sempurna namun tetap diberlakukan untuk saat ini guna mempertahankan garis kekerabatan yang diwariskan secara turun temurun.

⁴⁴ wawancara dengan Drs. Yudha Rozali, Anak yang diangkon, Tanggal 20 Maret 2008

Berdasarkan hasil wawancara dengan punyimbang, Pelaksanaan pengangkongan dalam perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun Pubian, menjelaskan tentang proses dari awal hingga akhir dari pelaksanaan upacara *ngangkon*. Sesuai dengan pelaksanaan kegiatan adat yang telah ada, *ngangkon* merupakan suatu kegiatan yang seremonial yang dituangkan dalam suatu acara berupa rapat dewan pemimpin adat Lampung Pepadun akan menikah dengan orang yang berlainan suku dan akan dimasukkan menjadi warga adat Lampung. Rapat perwatin dihadiri oleh masyarakat adat setempat orang – orang yang berkepentingan saja.

Upacara *ngangkon* merupakan simbol bahwa orang berlainan suku telah menjadi warga adat Lampung pepadun yang ditandai dengan surat pernyataan dari majelis perwatin berupa konsep keputusan perwatin disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh majelis perwatin. Adapun syarat-syarat yang diajukan berupa *daw adat* (uang adat) yang telah ditentukan hanya memiliki perbedaan jika yang diangken wanita disertai dengan perlengkapan kecantikan (kosmetik), jika laki-laki yang diangken maka tidak disertai dengan perlengkapan kecantikan. Nilai dari *daw adat* (uang Adat) ini ditentukan berdasarkan susunan kedudukan kepunyimbang adat pepadun seseorang.

Dari penjelasan tentang pelaksanaan pengangkongan tersebut di atas maka dapat ditafsirkan bahwa pengangkongan merupakan suatu kegiatan yang penuh dengan makna yang sarat dengan adat istiadat, hal ini dilihat dari tata cara pelaksanaan pengangkongan yang melibatkan seluruh

masyarakat adat Lampung Pepadun yang ada di lingkungan tempat orang yang melakukan upacara pengankonan. Selanjutnya syarat-syarat yang berupa daw adat diserahkan secara simbolis dan memiliki ketentuan tersendiri, dan menunjukkan kedudukan seseorang dalam lingkungan masyarakat adat, semakin tinggi nilai yang diberikan, semakin tinggi kedudukan seseorang, nilai tersebut berupa kelipatan yang dimulai dari nilai yang tertinggi yaitu 24 kemudian 12 dan 6.

4. Makna *Ngangkon*

Sebenarnya masih banyak data yang diperlukan agar peneliti dapat mencapai interpretasi yang dalam, untuk menarik kesimpulan atas makna upacara pengankonan dalam perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun Pubian. Dikarenakan keterbatasan data yang tersedia, maka interpretasi yang peneliti berikan dapat berubah, apabila data baru dari masyarakat adat Lampung Pepadun Pubian mengalami perubahan dalam pola pikir atau tingkah laku yang mengikuti perkembangan zaman yang global.

Berdasarkan analisis data diatas, peneliti berkesimpulan bahwa makna upacara pengankonan dalam perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun adalah merupakan suatu usaha untuk mempertahankan tali kekerabatan adat yang ada tidak terputus walaupun menikah dengan orang yang berlainan suku, karena *ngangkon* merupakan ketentuan yang harus

dipenuhi bagi mereka yang menikah dengan suku lain guna mengikuti tata tertib adat dan untuk mendapatkan legalitas perkawinan yang dilakukan.

C. Kedudukan Anak Yang Telah Diangkon Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Akibat hukum setelah diangkon ini, Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa *ngangkon* diawali dengan orang yang bersangkutan datang kepada rukun tetangga yang dituju untuk memberitahu tentang *ngangkon* dan dipilih orang tua angkat. Setelah keluarga yang akan *mengangkon* mengetahui latar belakang keluarga yang akan diangkon, maka mereka memberitahukan kepada majelis perwatin.

Sesuai dengan realita yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Negeri Sakti adalah apabila suatu keluarga yang akan menikah dengan orang berlainan suku, kemudian diangkat oleh orang Lampung yang telah ditunjuk atau dipilih sebagai bapak angkat yang didasarkan atas beberapa pertimbangan, maka sebelum ia melangsungkan perkawinannya harus *ngangkon* terlebih dahulu. Kedudukan seseorang yang telah diangkon adalah sama kedudukannya baik perempuan ataupun laki-laki dengan anak kandung.⁴⁵

Lebih lanjut beliau menjelaskan Kedudukan seseorang yang telah diangkon dalam masyarakat adat, antara lain :

⁴⁵ wawancara dengan Bapak Ismail Gelar Pengiran Mantap, Tokoh Adat, Tanggal 19 Maret 2008

1. Kedudukan mekhanai (Bujang) yang diangkat didalam keluarga dan didalam adat.

Seseorang yang telah diangkon (diangkat) adalah merupakan kerabat dari keluarga yang telah mengangkat seseorang yang berasal dari luar suku Lampung Pepadun adalah sama kedudukannya dengan anak kandung dari seseorang yang telah mengangkat tersebut didalam adat. Apabila bujang yang berasal dari luar suku Lampung Pepadun diangkat menjadi *anak tuha* (anak tertua) maka ia mempunyai hak yang lebih besar di dalam adat dari pada anak kandung, karena ia telah mempunyai nama tuha atau gelar atau adok ataupun *jejuluk*, misalkan seorang yang mengangkat tersebut mempunyai gelar sebagai paaksi maka ia bias mempunyai gelar atau panggilan Gusti atau Kanjeng.

Apabila pada suatu saat orang tua atau ayah dalam adat dari bujang tersebut meninggal dunia, dan anak kandung dari orang tua dalam adat tersebut masih bujang atau belum menikah dan belum mempunyai nama tuha, maka anak kandung beliau tersebut belum mempunyai hak untuk menggantikan kedudukannya didalam adat tapi yang berhak adalah seseorang yang berasal dari luar suku Lampung Pepadun yang telah diangkon (diangkat) menjadi anak tersebutlah yang berhak atas kedudukan orang tua mereka tersebut. Seseorang yang berasal dari luar suku Lampung Pepadun yang telah diangkon tersebut berhak mengikuti upacara-upacara adat, berhak hadir dalam undangan-undangan adat dari orang lain yang telah menjadi warga atau telah masuk menjadi

masyarakat adat Lampung Pepadun karena ia telah melewati tahap pengangknan (pengangkatan).

2. Kedudukan Muli (gadis) yang diangknan (diangkat) dalam keluarga dan dalam adat

Seseorang muli atau gadis yang akan diangkat bias dijadikan sebagai anak perempuan atau bisa dijadikan sebagai anak perempuan ataupun bisa juga dijadikan *nakbai* (*adik perempuan*). Kedudukan gadis yang berasal dari luar suku yang telah diangkat menjadi anak perempuan ataupun adik perempuan dalam adat adalah sama kedudukannya dengan anak perempuan ataupun adik perempuan kandung dari seseorang yang telah mengangkannya.

Gadis yang telah diangkat tersebut disebut dengan mirul karena telah menikah atau dengan kata lain ia bukanlah seseorang yang masih muli atau gadis lagi. Mirul ini adalah tempat bertanya bagi orang-orang yang ada disekitarnya apabila ada hajat pada keluarga yang mengangkat ia sebagai anak ataupun sebagai nakbai (adik perempuan) tersebut, dan mirul tersebut bertugas dan bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang ada, dan apabila ia menjadi mirul tuha (kakak tertua) maka ia adalah tempat bertanya atau panutan bagi kakak atau adik yang lain yang berada dibawahnya.

Dengan adanya acara pengangknan (pengangkatan) tersebut, maka adanya juga pengakuan masyarakat adat lampung serta perwatin

yang ada dalam masyarakat adat lampung itu sendiri. Sehingga menantu dapat diakui dalam adat dan sah menjadi warga adat Lampung, sehingga orang Lampung yang menikah dengan orang yang berlainan suku tidak hilang statusnya dalam adat sebagai orang Lampung.

Pada umumnya yang menjadi ahli waris di Desa Negeri Sakti adalah para warga yang paling dekat didalam generasi berikutnya ialah anak-anak yang dibesarkan didalam keluarga si pewaris yang pertama-pertama mewarisi ialah anak tiri, anak angkat, anak piara, kemenakan dan para ahli waris pengganti seperti cucu, ayah ibu, kakek, nenek, ahli waris anggota kerabat dan ahli waris lainnya.

Dalam hal hak mewaris, Anak yang diangkon ini tidak mewaris, maksudnya bahwa si anak yang diangkat tidak berhak mendapatkan warisan dari yang *mengangkonnya* (bapak angkatnya) karena *ngangkon* semata-mata hanya untuk mendapatkan pengakuan saja dari masyarakat dan majelis perwatin bahwasannya yang diangkat sudah masuk kerabatnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan upacara *ngangkon* pada masyarakat adat Lampung Pepadun Pubian di Desa Negeri Sakti berjalan sesuai dengan ketentuan adat, yaitu mulai dari pengangkatan bapak angkat sampai dengan pembayaran uno (daw adat/uang adat), namun apabila tidak atau belum ada tersedianya uno (daw adat/uang adat) sebagai penentu terlaksananya *ngangkon* maka upacara *ngangkon* tersebut dapat terhambat bahkan dibatalkan. Pelaksanaan perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu : *Pertama*, upacara lamaran (pineng) yang ditandai dengan pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan, upacara penjemputan mempelai yakni pengantin wanita akan di bawa ke kediaman calon pengantin pria untuk melangsungkan pernikahan di kediaman pengantin pria. *Kedua*, upacara cuak mengan yakni merupakan tindakan pemberitahuan kepada seluruh kerabat dan masyarakat umum bahwa pihak yang melaksanakan acara tersebut telah mengambil seorang calon pengantin. *Ketiga*, pelaksanaan upacara perkawinan dan upacara manjau pedem yaitu sebagai timbal balik dari acara perkawinan yang telah dilakukan.
2. Kedudukan Anak yang diangkon Dalam Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah kedudukan menantu dapat diakui dalam adat dan sah

menjadi warga adat Lampung, sehingga orang Lampung yang menikah dengan orang yang berlainan suku tidak hilang statusnya dalam adat sebagai warga adat Lampung.

Upacara *ngangkon* dilakukan sebelum upacara perkawinan dilangsungkan secara adat, karena kegiatan ini merupakan suatu rangkaian yang harus dilakukan apabila menikah dengan orang berlainan suku, guna mendapatkan pengakuan secara sah dari majelis perwatin dan masyarakat adat. Warga adat Lampung yang menikah dengan orang yang berlainan suku, jika tidak melakukan upacara *ngangkon*, maka sanksi hukumnya adalah tidak mendapat pengakuan secara sah dari majelis perwatin dan masyarakat adat Lampung Pepadun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dengan acara pengangkongan ini dapat mempertahankan tali kekerabatan adat yang ada tidak terputus walaupun menikah dengan orang yang berlainan suku, karena pengangkongan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi bagi mereka yang menikah dengan suku lain untuk mendapat legalitas perkawinan yang dilakukan, serta upacara pengangkongan dapat dilakukan lebih sederhana tanpa meninggalkan kesakralan ketentuan adat yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman tanpa merubah nilai dan isi budaya itu sendiri.

2. Kepala Adat (punyimbang) diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan pengetahuan khususnya mengenai perkawinan dan pengangkatan secara adat dengan muda-mudi atau penerus masyarakat adat Lampung Pepadun, agar masyarakat adat Lampung tidak meninggalkan serta melupakan tradisi dan adat istiadat tersebut. Dalam pembayaran uang adat pengangkatan diharapkan sesuai dengan nilai mata uang yang berlaku, sebagai contoh uang 1 riyal berjumlah Rp. 200, yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan kondisi ekonomi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahsan, M.Adnan; Zulchilal Bahsan dan Badri Bahsan, *Pelestarian Nilai-nilai Adat dan Upacara Perkawinan Adat Lampung Pesisir*, Makalah disampaikan pada Dies Natalis Universitas Lampung, Tanjung Karang, 1982.
- Bastian Tafal. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Dikemudian Hari*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002
- Depdikbud, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, Bandar Lampung, 1996
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat istiadat dan Upacara Adatnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003
- _____, *Hukum Waris Adat*. Alumni, Bandung, 1983.
- _____, *Hukum Perkawinan Adat*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 1992.
- _____, *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta : Fajar Agung, 1987.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Prodjodikoro, R.Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Jakarta : Sumur Bandung, 1980.
- Puspawicjaja Rizani dkk. *Hasil Penelitian Hukum Tidak Tertulis Masyarakat Lampung*. FH Unila, Tanjung Karang. 1980.
- Sayuti Ibrahim, *Buku Handak II Mengenal Adat lampung*, Gunung Pesagi, Bandar Lampung, 1995.
- Soekanto, Soerjono dan soleman B Taneko. *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- _____, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2002.

-----*Garis-garis Besar Hukum Perkawinan Buay Suay Umpu, Lampung Pepadun, Hukum Nasional.* Rajawali, Jakarta. 1969.

Soemitro, Ronny hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung. 1982

Soerojo wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1995.

_____, *Pengantar dan azas-azas Hukum Adat*. Bandung Alumni, 1971.

Soimin, Soedharyo, *Himpunan Dasar Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta. 2000.

St. Nyinang Marga, Firmansyah, *Diktat Adat Bujang Gadis Lampung Siwo Mego*, Lampung Tengah. 1990

Soleman B Toneko, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Erasco, Bandung, 1981.

Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001.

S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito. Bandung. 1992

